



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**Jl. Kartini No.17, Kota Palu
Sulawesi Tengah,
94112**



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NOMOR 25 TAHUN 2025

ABOUT

REGIONAL STRATEGIC PLAN
YEAR 2025-2029

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.



BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

8
12

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,




ANWAR HAFID



KATA PENGANTAR

Sebagai makhluk yang berakal dan sebagai wujud penghambaan kita kepada Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Sulawesi Tengah dan seyogyanya dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2025-2029.

Semoga Allah SWT. melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya pada tahun-tahun mendatang.

Palu, 12 September 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SISLIANDY PONULELE
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19780707 199712 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	93
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	125
3.1 Tujuan dan Sasaran	125
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	144
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	164
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	164
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	254
BAB V PENUTUP	257
5.1 Catatan Penting	257
5.2 Kaidah Pelaksanaan	257
5.3 Rencana Tindak Lanjut	258



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024	22
Tabel 2.2.	Jumlah UMKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Unit Usaha)	25
Tabel 2.3.	Jumlah UMKM Menurut Kabupaten/Kota Pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Tahun 2022-2023 (Unit Usaha)	27
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan/Ruang (Tahun 2025)	29
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Non Struktural (Tahun 2025)	30
Tabel 2.5.	Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki	33
Tabel 2.6.	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	35
Tabel 2.7.	Asset Lainnya	37
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	39
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	72
Tabel 2.10.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	94
Tabel 2.11.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111
Tabel 2.12.	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM	116



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 2.13.	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	119
Tabel 2.14.	Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	121
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030	135
Tabel 3.2.	Penahapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026-2030	145
Tabel 3.3.	Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	149
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	156
Tabel 4.1.	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	166
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030	197
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	250
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030	255
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil	256



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-
2030



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Orang)	28
Gambar 2.2.	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (%)	30
Gambar 2.3.	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	91
Gambar 2.4.	Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	98
Gambar 2.5.	Analisis Permasalahan Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Dari Aspek Kelembagaan dan Pengawasan	99
Gambar 2.6.	Analisis Permasalahan Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Dari Aspek Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	100
Gambar 2.7.	Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	101
Gambar 2.8.	Analisis Permasalahan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	102
Gambar 2.9.	Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	104
Gambar 2.10.	Analisis Permasalahan Rasio Kewirausahaan	105
Gambar 2.11.	Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023-2024	106
Gambar 2.12.	Analisis Permasalahan Indeks Reformasi Birokrasi	108



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah

Gambar 3.1.	Relevansi Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Dalam Mengatasi Tantangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah	126
Gambar 3.2.	Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Dalam Mendukung Pelaksanaan Misi Ke-2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	127
Gambar 3.3.	Identifikasi Karakteristik Faktor Pendukung Peningkatan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	129
Gambar 3.4.	Identifikasi Karakteristik Faktor Pendukung Peningkatan Jumlah Wirausaha	130
Gambar 3.5.	Identifikasi Karakteristik Faktor Pendukung Peningkatan Volume Usaha Koperasi	131
Gambar 3.6.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 Terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	134
Gambar 3.7.	Program Prioritas “Sulteng Berani” Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	138
Gambar 3.8.	Sasaran Inovasi Program Prioritas “Sulteng Berani” Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	141
Gambar 4.1.	Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	165



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konseptual dan teknokratis, proses pembangunan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pembangunan yang ditetapkan yaitu mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap, berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, pembangunan daerah sebaiknya dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan melibatkan *stakeholder* dan lapisan masyarakat. Tugas dan fungsi strategis ini hanya dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang transparan, responsif, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang dimiliki daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.



Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Telah disebutkan di atas bahwa penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan demikian kedudukan Rencana Strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Selain itu, dalam penyusunan Rencana Strategis tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di daerah agar tercipta harmonisasi, sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah merupakan pelaksana utama (*leading sector*) dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang didukung oleh berbagai *stakeholder* pembangunan lainnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Sulawesi Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.



Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, serta bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terlebih dahulu dilaksanakan review terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia guna menjaga keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Rencana Kerja yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Perumusan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, kesepakatan yang dihasilkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi acuan untuk penyempurnaan dari rancangan tersebut menjadi rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Selanjutnya rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang pengesahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168); dan

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar harmonisasi, sinergitas, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang bertumpu pada kebijakan *money follow program* dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga bertujuan untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah; memperkuat komunikasi dan

koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perangkat Daerah lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah; Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penjelasan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Memuat informasi tentang Catatan Penting; Kaidah-kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di Lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;

- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi; f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
- i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- m. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

III. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

IV. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

V. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki satu Unit Pelaksana Teknis yakni Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Uraian mengenai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dijabarkan sebagai berikut:

I. UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil menengah;
- b. penyiapan bahan dan data, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- c. penyiapan sosialisasi kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- d. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan silabi dan sarana prasarana UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelolah keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Bagian Ketiga Seksi Kurikulum Silabi

Seksi Kurikulum Silabi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi. Uraian tugas Seksi Kurikulum Silabi meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Kurikulum Silabi;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
- c. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan Pimpinan; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum Silabi.

3. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan. Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. melaksanakan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan penyelenggara pelatihan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif, registrasi mengenai penyelenggaraan pelatihan;
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan, penggalan dan pemeliharaan penyelenggara pelatihan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan Pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.

Koperasi mempunyai peranan yang penting dalam membangun perkembangan serta pertumbuhan perekonomian di Indonesia, begitupun juga pertumbuhan perekonomian di daerah Sulawesi Tengah. Koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Definisi Koperasi:

Pengertian koperasi dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari Bahasa Latin coopere atau cooperation dalam Bahasa Inggris. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi, cooperation berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kerjasama dalam bidang ekonomi disebut economic cooperation.

Definisi koperasi menurut Moh. Hatta sebagai pendiri lembaga koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Sedangkan definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan Peran Koperasi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian pada Pasal 5 disebutkan bahwa prinsip Koperasi terbagi menjadi dua, yakni: 1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan e. kemandirian; 2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: a. pendidikan perkoperasian; dan b. kerja sama antarkoperasi.

Berdasarkan watak dan ideologinya, koperasi merupakan media yang sangat strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di daerah. Dengan prinsip asas kekeluargaan, koperasi merupakan media yang menghimpun secara sinergis kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil melalui penguasaan asset produktif secara kolektif yang akan digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Jadi peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional tidak hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan para anggotanya tetapi juga harus mampu meningkatkan kepemilikan asset produktif bagi anggotanya. Melalui koperasi yang berbasis komunitas diharapkan akan dapat dibangun kesejahteraan secara bersama (*kolektif*) dan memunculkan semangat gotong royong sebagai ruh dari ekonomi kerakyatan.

Jumlah koperasi di Sulawesi Tengah terus mengalami perkembangan selama beberapa tahun terakhir, hal tersebut ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi sebesar 3,26 persen per tahun. Pada Tahun 2024 jumlah koperasi mencapai sebesar 2.635 unit, dengan koperasi aktif berjumlah sebesar 1.578 unit dan koperasi tidak aktif sejumlah 1.057 unit. Dengan perbandingan tersebut, maka diketahui bahwa Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 59,89 persen. Jumlah koperasi terbanyak pada Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Poso dengan jumlah sebesar 370 unit, dan kemudian di Kabupaten Banggai sejumlah 317 unit. Secara rinci perkembangan koperasi Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Berdasarkan Status					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
1.	Kabupaten Banggai Kepulauan	26	74	100	30	81	111
2.	Kabupaten Banggai	150	39	189	183	134	317
3.	Kabupaten Morowali	61	95	156	53	95	148

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Berdasarkan Status					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
4.	Kabupaten Poso	247	122	369	245	125	370
5.	Kabupaten Donggala	58	75	133	72	68	140
6.	Kabupaten Tolitoli	114	104	218	115	105	220
7.	Kabupaten Buol	34	192	226	136	102	238
8.	Kabupaten Parigi Moutong	222	9	231	213	88	301
9.	Kabupaten Tojo Una-Una	28	25	53	25	26	51
10.	Kabupaten Sigi	82	15	97	88	16	104
11.	Kabupaten Banggai Laut	25	37	62	29	33	62
12.	Kabupaten Morowali Utara	54	82	136	68	86	154
13.	Kota Palu	91	129	220	141	85	226
14.	Provinsi Sulawesi Tengah	75	32	107	180	13	193
	Jumlah	1.267	1.030	2.297	1.578	1.057	2.635

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024-2025

Selain Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun

eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Definisi UMKM:

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).*
- 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*
- 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).*

Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipandang sangat penting guna meningkatkan

pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional dan daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Penekanan pada pengembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membawa pembahasan penelitian ini menuju konsep pengembangan ekonomi lokal yang kreatif melalui proses kewirausahaan yang dinamis, serta kesejahteraan komunitas dan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi semua yang berada dalam komunitas yang terlibat langsung dalam pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sampai dengan Tahun 2022, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 392.535 unit usaha, yang masih didominasi oleh usaha mikro yang mencapai sebesar 369.005 unit usaha atau secara proporsi mencapai sebesar 94,01 persen. Hal tersebut menandakan bahwa usaha kecil dan menengah di Sulawesi Tengah hanya sebesar 5,99 persen di Tahun 2022. Secara rinci jumlah usaha mikro, kecil dan menengah Sulawesi Tengah di Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah UMKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Unit Usaha)

No.	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Kota Palu	70.190	1.202	484
2.	Kabupaten Sigi	42.931	6.492	289
3.	Kabupaten Donggala	25.008	899	160
4.	Kabupaten Parigi Moutong	51.542	3.589	152
5.	Kabupaten Poso	48.318	1.719	172
6.	Kabupaten Tojo Una-Una	17.062	231	83

No.	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
7.	Kabupaten Morowali	5.435	86	44
8.	Kabupaten Morowali Utara	8.003	432	37
9.	Kabupaten Banggai	7.093	2.177	321
10.	Kabupaten Banggai Kepulauan	5.156	876	27
11.	Kabupaten Banggai Laut	4.573	694	28
12.	Kabupaten Tolitoli	35.775	2.664	62
13.	Kabupaten Buol	47.919	578	32
	Jumlah	369.005	21.639	1.891

Sumber: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2023

Terdapat masalah terhadap data jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah. Karena data yang digunakan merupakan data statis, sementara itu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Permasalahan data tersebut diakibatkan tidak dilakukannya pendataan dan pemutakhiran terhadap jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Data usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak valid memaksa pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan secara berkualitas tidak dapat terwujud.

Ketersediaan data usaha mikro, kecil dan menengah yang terintegrasi dapat menjadi alat kontrol/monitoring dan evaluasi yang dapat dijadikan dasar perencanaan program pembangunan bidang usaha mikro, kecil dan menengah dimasa mendatang. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka pada Tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM). Cakupan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi seluruh unit usaha/perusahaan di seluruh Indonesia, yang pada tahap awal pendataan di Tahun 2022 akan menargetkan sejumlah 14,5 juta usaha yang berbadan hukum Koperasi,

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diprioritaskan yang memiliki kriteria menetap (memiliki bangunan usaha dan campuran) berhasil teridentifikasi. Hasil Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah UMKM Menurut Kabupaten/Kota
Pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT)
Tahun 2022-2023 (Unit Usaha)

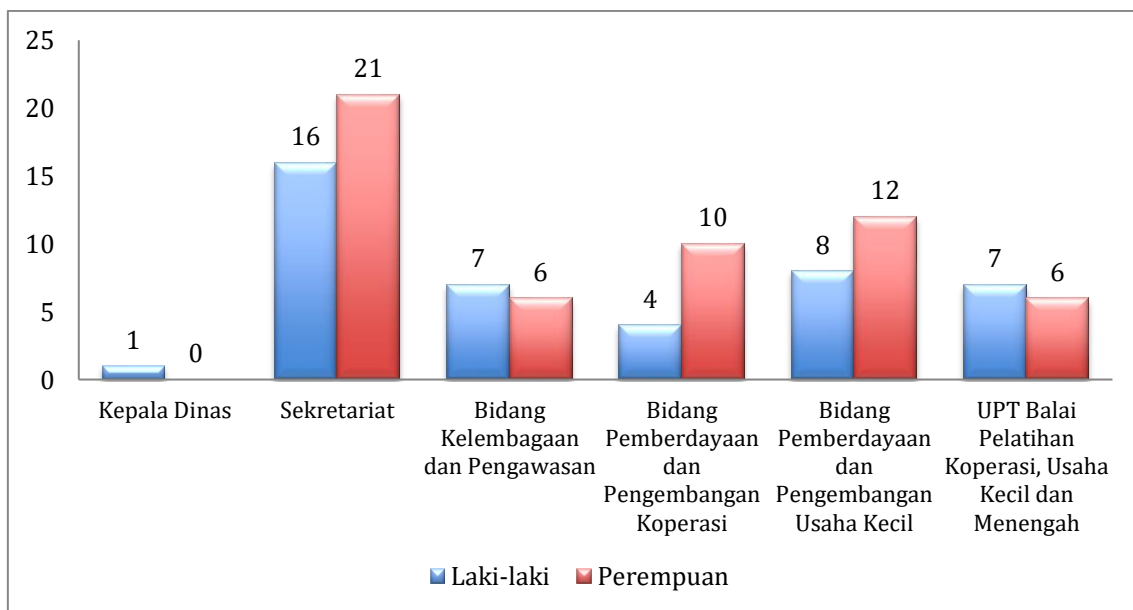
No.	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Kota Palu	4.175	3	-
2.	Kabupaten Sigi	18.293	37	12
3.	Kabupaten Donggala	10.698	3	1
4.	Kabupaten Parigi Moutong	41.108	232	36
5.	Kabupaten Poso	8.391	8	1
6.	Kabupaten Tojo Una-Una	18.551	69	10
7.	Kabupaten Morowali	976	-	1
8.	Kabupaten Morowali Utara	8.180	36	9
9.	Kabupaten Banggai	4.566	6	1
10.	Kabupaten Banggai Kepulauan	12.701	36	4
11.	Kabupaten Banggai Laut	5.985	19	5
12.	Kabupaten Tolitoli	20.612	73	14
13.	Kabupaten Buol	16.244	51	8
	Jumlah	170.480	573	102

Sumber: Data Sistem Informasi Data Tunggal Tahun 2025

Hasil Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan pada Tahun 2022-2023 menunjukkan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 171.155 unit usaha, yang masih didominasi oleh usaha mikro yang mencapai sebesar 170.480 unit usaha atau secara proporsi mencapai sebesar 99,61 persen, dan usaha kecil dan menengah di Sulawesi Tengah hanya sejumlah 675 unit usaha atau sebesar 0,39 persen. Hal ini masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong

adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, beserta melakukan pemutakhiran data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah setiap tahunnya.

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Perangkat Daerah yang akuntabel. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2025 didukung oleh personil sejumlah 98 orang sebagaimana yang tertera dalam gambar berikut ini:



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKUKM Prov. Sulteng Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Gambar 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Orang)

Perbandingan aparatur berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan adalah 43:55 atau bisa dikatakan 56,12 persen pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah perempuan. Pangkat/golongan/ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai,

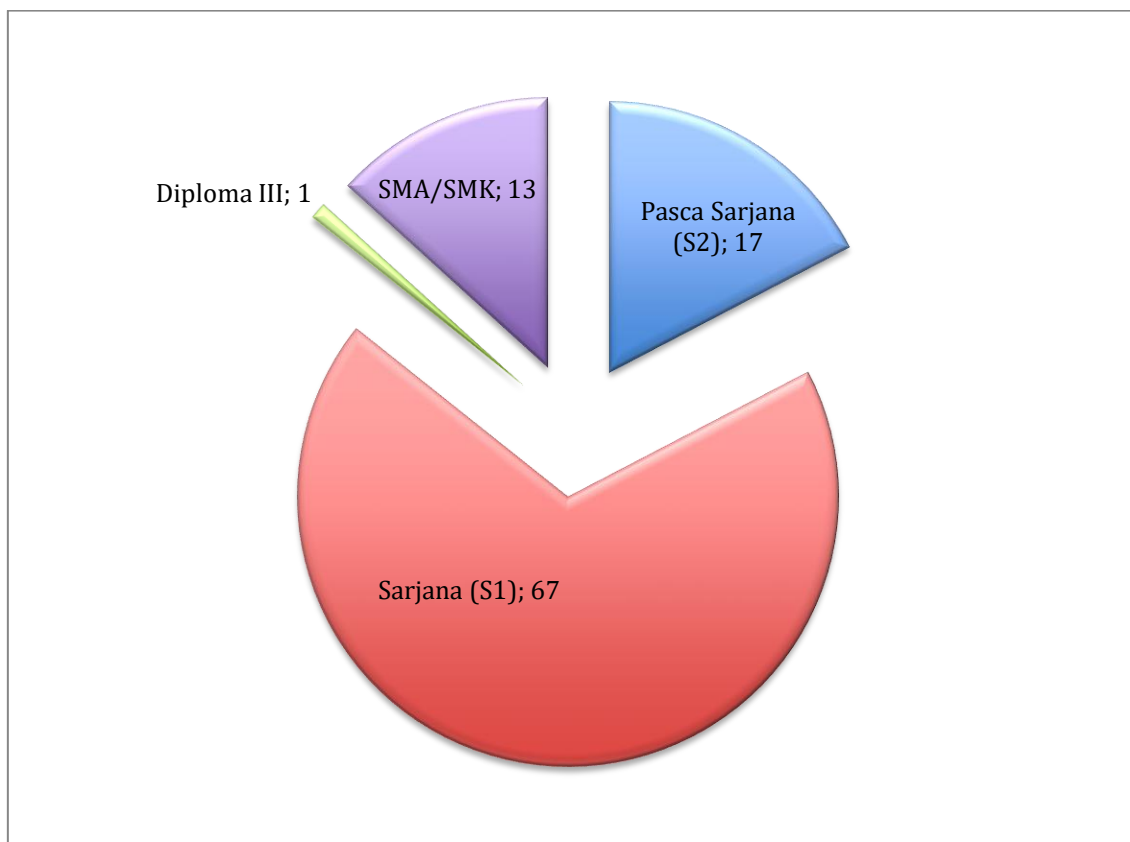
dimana karier pegawai tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, kondisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menurut pangkat/golongan/ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan/Ruang
(Tahun 2025)

No.	Pangkat/Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 Orang
3.	Pembina (IV/a)	11 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	14 Orang
5.	Penata (III/c)	5 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	5 Orang
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 Orang
9.	Pengatur (II/c)	2 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 Orang
11.	PPPK (IX)	46 Orang
12.	PPPK (V)	3 Orang
Jumlah		98 Orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKUKM Prov. Sulteng Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menurut pangkat/golongan/ruang sampai dengan Tahun 2025 masih didominasi oleh golongan III sebanyak 30 orang atau 30,61 persen, kemudian golongan IV sebanyak 15 orang atau 15,31 persen, golongan II sebanyak 4 orang atau 4,08 persen. Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada golongan IX sebanyak 46 orang atau 46,94 persen, dan golongan V sebanyak 3 orang atau 3,06 persen. Tingkat pendidikan aparatur merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKUKM Prov. Sulteng Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menurut tingkat pendidikan sampai dengan Tahun 2025 yaitu: (a) Pasca Sarjana sebanyak 17 orang atau 17,35 persen; (b) Sarjana sebanyak 67 orang atau 68,37 persen; (c) Diploma III sebanyak 1 orang atau 1,02 persen; dan (d) SMU/SMK sebanyak 13 orang atau 13,27 persen. Adapun komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menurut jabatan struktural/non struktural adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Non Struktural
(Tahun 2025)**

No.	Uraian	Jabatan Struktural/Non Struktural				
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU/JFK	PHL/PTT
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	1	2	34	20
3.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	1	-	12	4
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	-	13	1
5.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	-	1	-	19	5
6.	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1	3	9	11
Jumlah		1	5	5	87	41

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKUKM Prov. Sulteng Tahun 2025, Data Diolah Kembali

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi, komposisi pegawai dapat dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan non struktural yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kondisi pegawai sampai dengan Tahun 2025, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 1 orang pejabat struktural eselon II, 5 orang pejabat struktural eselon III, 5 orang pejabat struktural eselon IV, 87 orang jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus, dan 41 orang PHL/PTT.

Selanjutnya, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga terdapat Tenaga Konsultan Pendamping Pusat Layanan Umum Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang bertugas dalam memberikan layanan pendampingan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pendampingan di bidang Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran, Pengembangan Informasi Teknologi, dan Pengembangan Jaringan Kerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PLUT-KUMKM adalah merupakan Lembaga Mediasi bagi Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang mana keberadaan PLUT-KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki peran vital dalam sinergi dan kolaborasinya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta *stakeholder* terkait dalam upaya pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 (tujuh) Bidang Konsultan dalam perannya melakukan layanan pendampingan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan, Pembentukan kelompok usaha dan Pendampingan NIB melalui OSS;
2. Bidang Sumber Daya Manusia, Memberikan Pelatihan dan Pendampingan bagi startup, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Naik Kelas;
3. Bidang Produksi, Mengadakan Pendampingan Produk Industri Kecil dan Menengah Potensi Ekspor;
4. Bidang Pembiayaan, Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha dan pendampingan pembukuan keuangan usaha;

5. Bidang Pemasaran, Pelatihan dan pendampingan ke Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait pemasaran online, digital marketing, label dan desain kemasan, market place, pembuatan website/landing page, desain grafik, oss dan video grafis;
6. Bidang Teknologi dan Informasi, Membantu Memfasilitasi pembuatan legalitas usaha melalui system OSS/Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, membantu memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempromosikan produk usahanya dimedia sosial; dan
7. Bidang Jaringan Kerjasama, Bentuk Pelayanan mengadakan pendampingan, mempertemukan para pelaku usaha dengan stakeholder dalam pengembangan jaringan usaha.

Barang Inventaris yang digunakan sebagai pendukung/operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5.
Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
Tanah				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2764	M ²	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6826	M ²	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M ²	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M ²	Baik
5	Tanah Kosong Lainnya	1000	M ²	Baik
6	Tanah Kosong Lainnya	3000	M ²	Baik
Bangunan				
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	M ²	Kurang Baik
19	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	M ²	Baik
20	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
21	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
22	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
23	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
24	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
25	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
26	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
27	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M ²	Baik
28	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M ²	Baik
29	Bangunan Kamar Mandi	1	M ²	Baik
30	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M ²	Baik
31	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M ²	Baik
32	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	M ²	Baik
33	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M ²	Baik
34	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M ²	Baik
35	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
36	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
37	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
38	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
39	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
40	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
41	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
42	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
43	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
44	Rumah Negara Golongan Iii Type B Permanen	1	M ²	Baik
45	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1	M ²	Baik
46	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M ²	Baik
47	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M ²	Baik
48	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
49	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
50	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
51	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
52	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M ²	Baik
53	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M ²	Baik
54	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M ²	Baik
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M ²	Baik
56	Lain-Lain	1	M ²	Baik
57	Lain-Lain	1	M ²	Baik
58	Lain-Lain	1	M ²	Baik
59	Lain-Lain	1	M ²	Baik
60	Lain-Lain	1	M ²	Baik

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2025

Adapun rincian kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6.
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2**

No	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
1	2	3	4	5	6
1	Pemadat Sampah	-	10	Unit	Baik
2	Electric Generating Set Lain-lain	GENSET	1	Unit	Baik
3	Staion Wagon	AVANZA / G MANUAL	1	Unit	Baik
4	Staion Wagon	SUZUKI APV / DLX	1	Unit	Baik
5	Staion Wagon	TOYOTA AVANZA	1	Unit	Baik
6	Staion Wagon	TOYOTA FORTUNER / G A/T	1	Unit	Baik
7	Staion Wagon	TOYOTA HILUX / PICK UP 2 OL	1	Unit	Baik
8	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / G M/T	1	Unit	Baik
9	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / S TRD	1	Unit	Baik
10	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
11	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
12	Sepeda Motor	Suzuki 125	1	Unit	Baik
13	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
14	Sepeda Motor	Honda GL	1	Unit	Baik
15	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
16	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	1	Unit	Baik
17	Sepeda Motor	Honda NF 125SF (FGM-FI)	1	Unit	Baik
18	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	1	Unit	Baik
19	Sepeda Motor	Suzuki FL125 SD	1	Unit	Baik
20	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
21	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
22	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
23	Sepeda Motor	Honda CBR 250 RAB (IN)	1	Unit	Baik
24	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
25	Sepeda Motor	Yamaha 14D AL115C Mio S	1	Unit	Baik
26	Sepeda Motor	Yamaha	1	Unit	Baik
27	Sepeda Motor	Honda NF11C1C M/T	1	Unit	Baik

No	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
28	Sepeda Motor	Honda NC12A1CF A/T	1	Unit	Baik
29	Sepeda Motor	Yamaha 1LB	1	Unit	Baik
30	Sepeda Motor	Honda X1B02R07L0 A/T	1	Unit	Baik
31	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
32	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
33	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
34	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
35	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
36	Sepeda Motor	Honda ATI1121B01 A/T	1	Unit	Baik
37	Sepeda Motor	Honda E1F02N11M2	1	Unit	Baik
38	Sepeda Motor	-	1	Unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2025

Adapun asset lainnya milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang patut untuk dilaporkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7.
Asset Lainnya**

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
1	2	3	4	5
1	Aset Renovasi	1		Rusak Berat
2	Aset Renovasi	1		Rusak Berat
3	Aset Renovasi	1		Rusak Berat
4	Aset Renovasi	1		Rusak Berat
5	Aset Renovasi	1		Rusak Berat
6	Aset Renovasi	1		Rusak Berat
7	Aset Renovasi	1		Rusak Berat

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2025

Seluruh sarana dan prasarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rekapan sebagaimana telah ditampilkan pada tabel di atas. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki asset berupa Gedung Kantor Permanen dan Mess pada UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Asset lain juga berupa Gedung PLUT-KUMKM. Gedung yang ada kemudian diarahkan menjadi sarana prasarana tempat berhimpunnya Tenaga Konsultan Pendamping melayani kebutuhan para pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari lima sisi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran, sebagaimana telah dijabarkan diatas peran dari vital juga dari Tenaga Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan pelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan biasanya tidak berwujud.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang ditunjukkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak lepas dari peran



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

aktif seluruh aparaturnya untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Tabel 2.8.
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	IKK																		
1	Persentase Koperasi aktif		✓		65,72	65,7	55,92	56,15	56,38	55,45	55,2	66,35	67,57	56,38	84,37	84,02	118,65	120,34	100,00
2	Persentase Usaha Mikro dan kecil		✓		97,07	97,1	99,48	99,51	99,54	99,42	97,5	99,52	99,52	99,54	102,42	100,41	100,04	100,01	100,00
3	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif		✓		0	0	54	56	58	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase BPR/LKM Aktif		✓		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
B.	IKU																		
1	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja			✓	0	1,35	1,35	1,45	1,54	0,00	1,47	1,47	1,47	1,54	0,00	108,89	108,89	101,38	100,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Persentase Koperasi yang berkualitas			✓	0	5,77	5,77	3,85	3,85	0,00	16,84	7,25	8,11	12,67	0,00	291,85	125,65	210,65	329,09
3	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha			✓	0	6,5	5,57	4,06	4,44	0,00	1,39	6,24	4,04	4,44	0,00	21,38	112,03	99,51	100,00
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			✓	-	60,00	62	64	66	0,00	50,61	72,89	61,92	58,71	0,00	84,35	117,56	96,75	88,95
C.	Kinerja Program dan Kegiatan																		
1	Indeks Reformasi Birokrasi			✓	-	63,00	62,00	64,00	66,00	-	0,00	50,61	61,92	58,71	-	0,00	81,63	96,75	88,95
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			✓	-	71,00	73,00	75,00	80,00	-	0,00	71,76	85,20	89,45	-	0,00	98,30	113,60	111,81
3	Persentase Realisasi Anggaran			✓	-	95,00	100,00	96,00	0,00	-	0,00	100,00	91,21	0,00	-	0,00	100,00	95,01	0,00
4	Presentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan			✓	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	BPK dan APIP Perangkat Daerah																		
5	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah			✓	-	5,00	5,00	5,00	-	-	0,00	5,00	5,00	0,00	-	0,00	100,00	100,00	-
6	Persentase Pemenuhan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			✓	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			✓	-	76,61	80,00	85,00	-	-	0,00	81,86	85,72	-	-	0,00	102,33	100,84	-
8	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah			✓	-	-	-	-	71,00	-	-	-	-	35,61	-	-	-	-	50,15
9	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa			✓	-	5,00	5,00	4,00	-	-	0,00	5,00	4,00	-	-	0,00	100,00	100,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah			✓	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
11	Indeks SPBE Perangkat Daerah			✓	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	1,69	-	-	-	-	65,00
12	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah			✓	-	-	-	-	3,51	-	-	-	-	4,12	-	-	-	-	117,38
13	Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah			✓	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	50,00
14	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			✓	-	3,00	-	2,00	-	-	0,00	-	2,00	-	-	0,00	-	100,00	-
15	Jumlah laporan Penyediaan Jasa			✓	-	4,00	3,00	2,00	-	-	0,00	3,00	2,00	-	-	0,00	100,00	100,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
16	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			✓	-	4,00	2,00	3,00	0,00	-	0,00	2,00	3,00	-	-	0,00	100,00	100,00	-
17	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik			✓	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
18	Persentase Penerbitan Izin Usaha KSP (Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas)			✓	-	-	13,00	-	-	-	-	15,79	-	-	-	-	121,46	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
19	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas			✓	-	-	-	13,16	-	-	-	-	8,95	-	-	-	-	68,01	-
20	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	5,00	3,00	-	-	-	6,00	3,00	-	-	-	120,00	100,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2 1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	-	-	7,89	-	-	-	-	7,89	-	-	-	-	100, 00
2 2	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam			✓	-	-	8,00	2,00	-	-	-	12,0 0	6,00	-	-	-	150, 00	300, 00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
2 3	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas			✓	-	-	-	-	5,26	-	-	-	-	5,26	-	-	-	-	100,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
24	Jumlah Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	6,00	-	-	-	100,00	200,00	-
25	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi			✓	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	5,77	-	-	-	-	100,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	(NIK) untuk Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
26	Persentase Koperasi Berkualitas			✓	10,00	10,00	5,77	-	-	10,00	26,60	5,80	-	-	100,00	266,00	100,52	-	-
27	Persentase Koperasi Aktif			✓	-	-	4,60	3,45	3,45	-	-	5,26	3,60	3,45	-	-	114,35	104,35	100,00
29	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas			✓	-	-	5,00	6,00	-	-	-	7,00	9,00	-	-	-	140,00	150,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
30	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	-	-	13,46	-	-	-	-	13,46	-	-	-	-	100,00
31	Peningkatan Jumlah Anggota Koperasi			✓	-	-	100,00	230,00	100,00	-	-	182,00	253,00	100,00	-	-	182,00	110,00	100,00
32	Jumlah pemeriksaan dan			✓	-	-	4,00	2,00	-	-	-	7,00	9,00	-	-	-	175,00	450,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
3 3	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan			✓	-	-	-	-	5,26	-	-	-	-	5,26	-	-	-	-	100,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	nya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
34	Persentase Koperasi Sehat			✓	-	-	32,69	25,00	26,92	-	-	33,33	26,67	36,54	-	-	101,96	106,68	135,74
35	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah			✓	-	-	17,00	13,00	-	-	-	20,00	22,00	-	-	-	117,65	169,23	-
36	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh			✓	-	-	-	-	36,84	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	135,72



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
37	Persentase Jumlah Pengurus/ Anggota Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusiannya dan Bersertifikat Lulus			✓	-	-	0,67	0,42	0,74	-	-	0,38	0,28	1,29	-	-	56,71	66,66	174,32
38	Persentase Koperasi yang			✓	-	-	9,20	-	-	-	-	26,69	-	-	-	-	290,11	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Dengan Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
39	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi Dengan Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	-	12,00	78,00	-	-	-	5,00	360,00	-	-	-	41,67	461,54
40	Persentase Koperasi			✓	-	-	1,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	yang Telah Menyelengga rakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasia n Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
4 1	Jumlah Koperasi yang Telah Menyelengga rakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasia n Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan			✓	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00	3,00	-	-	-	100, 00	300, 00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
42	Persentase Koperasi Berkualitas			✓	10,00	10,00	-	-	-	10,00	26,60	-	-	-	100,00	266,00	-	-	-
43	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi			✓	-	-	8,58	6,22	8,00	-	-	22,74	9,64	8,00	-	-	227	154,98	100
44	Persentase Koperasi Modern			✓	-	-	2,30	1,15	2,30	-	-	1,67	1,15	1,14	-	-	72,61	100	49,56
45	Persentase Tenaga Kerja Terserap			✓	-	-	2,00	-	-	-	-	5,08	-	-	-	-	147,24	-	-
46	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku Usaha Lainnya			✓	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	25,00	-	-
47	Persentase Koperasi yang			✓	-	-	1,15	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	378,07	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
48	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)			✓	-	-	2,30	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	126,02	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Daerah Provinsi																		
49	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	3,45	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	126,02	-	-
50	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Untuk			✓	-	-	20,00	-	-	-	-	33,33	-	-	-	-	166,67	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
51	Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	23,00	3,00	-	-	-	2300	300
52	Jumlah Koperasi yang			✓	-	-	-	1,00	45,00	-	-	-	4,00	68,00	-	-	-	400	151,11



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
53	Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)			✓	-	-	-	3,00	44,00	-	-	-	18,00	44,00	-	-	-	600	100



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Daerah Provinsi																		
54	Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			✓	-	-	-	11,00	78,00	-	-	-	77,00	78,00	-	-	-	700	100
55	Peningkatan Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha Lainnya			✓	9,00	10,00	-	-	-	9,00	3,00	-	-	-	100,00	33,33	-	-	-
56	Jumlah Usaha Kecil			✓	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	100,00	66,67	-	-	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	yang Naik Kelas																		
57	Jumlah Usaha yang Mendapatkan Fasilitas			✓	1.000,00	1.000,00	-	-	-	238,00	708,00	-	-	-	23,80	70,80	-	-	-
58	Jumlah Usaha Kecil yang Mendapatkan Pendampingan			✓	500,00	500,00	-	-	-	151,00	208,00	-	-	-	30,20	41,60	-	-	-
59	Jumlah Produk Usaha Kecil yang Meningkatkan Kualitasnya			✓	50,00	50,00	-	-	-	88,00	97,00	-	-	-	176,00	194,00	-	-	-
60	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Kecil			✓	-	-	0,09	0,007	0,08	-	-	0,09	0,07	0,08	-	-	100,00	100,00	100,00
61	Persentase Usaha Kecil yang Diinput ke dalam Sistem Online Data			✓	-	-	8,97	-	0,50	-	-	1,85	-	0,50	-	-	20,62	-	100,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	System (ODS)																		
62	Persentase Usaha Kecil yang Bermitra			✓	-	-	0,22	-	4,71	-	-	0,07	-	2,34	-	-	31,82	-	49,68
63	Persentase Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitas Perizinan Usaha			✓	-	-	1,12	-	0,79	-	-	0,30	-	0,79	-	-	26,79	-	100,00
64	Persentase Usaha Kecil yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha			✓	-	-	0,72	-	0,50	-	-	2,10	-	0,50	-	-	291,67	-	100,00
65	Persentase Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan			✓	-	-	0,67	-	0,16	-	-	0,49	-	0,16	-	-	73,13	-	100,00
66	Jumlah Usaha Kecil			✓	-	-	2.000,00	600,00	-	-	-	401,00	600,00	-	-	-	20,05	100,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	yang Diinput ke dalam Sistem Online Data System (ODS)																		
67	Jumlah Usaha Kecil yang Bermitra			✓	-	-	50,00	25,00	-	-	-	15,00	25,00	-	-	-	30,00	100,00	-
68	Jumlah Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitas Perizinan Usaha			✓	-	-	250,00	100,00	-	-	-	95,00	100,00	-	-	-	38,00	100,00	-
69	Jumlah Usaha Kecil yang Diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha			✓	-	-	160,00	62,00	-	-	-	60	62	-	-	-	37,50	100,00	-
70	Jumlah Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan			✓	-	-	150,00	65,00	-	-	-	105,00	65,00	-	-	-	70,00	100,00	-



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

N o.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Fasilitasi Pembiayaan																		
7 1	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas			✓	-	-	0,001	0,01	0,01 3	-	-	0,00 46	0,01	0,01 3	-	-	460, 00	100, 00	100, 00
7 2	Persentase Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran			✓	-	-	1,34	-	0,95	-	-	1,45	-	0,95	-	-	108, 21	-	100, 00
7 3	Persentase Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha			✓	-	-	0,45	-	0,31	-	-	0,35	-	0,31	-	-	77,7 8	-	100, 00
7 4	Persentase Usaha Kecil yang Memanfaatk an Platform Digital			✓	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	100, 00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
75	Jumlah Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran			✓	-	-	300,00	120,00	-	-	-	294,00	120,00	-	-	-	98,00	100,00	-
76	Jumlah Usaha Kecil yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha			✓	-	-	100,00	50,00	-	-	-	100,00	50,00	-	-	-	10,00	10,00	-
77	Jumlah Usaha Kecil yang Memanfaatkan Platform Digital			✓	-	-	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	100,00	-

Sumber: Laporan Kinerja DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024, Data Diolah Kembali

Pada tabel di atas, diuraikan mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 terhadap pencapaian kondisi akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Penjelasan mengenai evaluasi pencapaian program kegiatan dan Penguraian dari capaian indikator-indikator kinerja yang mana saja yang telah dan belum memenuhi target yang direncanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi Aktif mencerminkan tingkat kesehatan dan keberlangsungan operasional koperasi yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Tengah. Koperasi dikatakan aktif bila melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), melakukan kegiatan usaha, serta terdaftar di sistem administrasi yang berlaku. Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2020-2021 stabil yaitu dikisaran 55 persen sedikit dibawah target tahunan, yang mana mencerminkan adanya tantangan dalam mengaktifkan koperasi pasca pandemi COVID-19. Banyak koperasi kecil yang vakum kegiatan. pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan yang signifikan dan melebihi target yaitu mencapai 66,35 persen dan 67,57 persen. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan program revitalisasi koperasi, peningkatan kesadaran anggota koperasi, serta program stimulus dari pemerintah daerah. Adapun pada Tahun 2024, realisasi kembali turun menjadi 56,38 persen yang mana menandakan adanya pengurangan jumlah koperasi aktif atau meningkatnya koperasi non-aktif yang tidak diperbaharui keaktifan datanya. Adanya fluktuasi terhadap realisasi koperasi aktif ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan dan pembinaan koperasi yang lebih kontinyu.
2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menunjukkan seberapa besar pelaku usaha mikro dan kecil mampu mengakses dana dari lembaga pembiayaan formal (bank, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro). Pada Tahun 2020 sampai 2021 angka ini terealisasi di angka tinggi, meski ada penurunan pada 2021 ke 97,50 persen diduga karena dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi permintaan pembiayaan atau ketatnya syarat lembaga pembiayaan. Pada Tahun

2022-2024 kembali meningkat signifikan mencapai 99,52 persen sampai 99,54 persen. Hal ini menunjukkan pemulihan kepercayaan perbankan dan meningkatnya kebutuhan modal kerja pelaku UMK seiring dengan pemulihan ekonomi daerah. Kinerja indikator ini stabil dan melampaui ekspektasi, menandakan bahwa intervensi pemerintah daerah (misal melalui penjaminan kredit, pelatihan proposal pembiayaan) berjalan efektif.

3. Realisasi atas Persentase UKM Non BPR/LKM aktif dan Persentase UMK tidak memiliki realisasi dari Tahun 2020-2024. Berdasarkan konfirmasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki UKM non BPR serta LKM sehingga menyebabkan kedua Indikator Kinerja ini tidak dapat terukur. Oleh karena itu, realisasi atas pengukuran kedua indikator ini pada Tahun 2020-2024 tidak dapat terealisasi.
4. Realisasi Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM Terhadap Total Tenaga Kerja, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi capaian pada Tahun 2024 tercatat sebesar 1,54 persen, yang berarti target tahunan sebesar 1,54 persen berhasil terpenuhi sepenuhnya (100 persen capaian). Kinerja ini menggambarkan adanya kontribusi positif sektor Koperasi dan UKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menekan angka pengangguran di provinsi tersebut. Kenaikan dari 1,35 persen pada Tahun 2021 menjadi 1,54 persen pada Tahun 2024 menandakan perkembangan sektor ini yang didukung oleh program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembinaan koperasi yang berkelanjutan. Meski demikian, peningkatan proporsi ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas kerja, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja di sektor tersebut agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin optimal.

5. Realisasi indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas, hasil capaian menunjukkan kinerja yang luar biasa di luar ekspektasi. Realisasi Tahun 2024 mencapai 12,67 persen, jauh melampaui target sebesar 3,85 persen atau setara dengan 329,09 persen dari target yang ditetapkan. Lonjakan signifikan ini juga tercermin sejak Tahun 2021 yang mencapai realisasi sebesar 16,84 persen, sebelum sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya, namun tetap jauh di atas target tahunan. Capaian tersebut mengindikasikan keberhasilan program revitalisasi koperasi, peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi, serta peningkatan kesadaran koperasi untuk memenuhi kewajiban administratif seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan penyusunan laporan keuangan. Meski demikian, lonjakan capaian ini juga perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya kesalahan pencatatan data atau perubahan definisi koperasi berkualitas yang bisa menyebabkan data bias. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa koperasi-koperasi yang telah masuk kategori berkualitas benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan mampu berperan sebagai motor penggerak perekonomian lokal.
6. Realisasi indikator Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha juga menunjukkan hasil yang memadai, meskipun dengan pola capaian yang fluktuatif sepanjang periode pengukuran. Target Tahun 2024 sebesar 4,44 persen berhasil tercapai dengan realisasi yang persis sama (4,44 persen), atau mencapai 100 persen dari target. Namun, bila menilik capaian tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa indikator ini sempat berada jauh di bawah target pada Tahun 2021 dengan realisasi hanya sebesar 1,39 persen dari target 6,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, proses transformasi usaha kecil menjadi wirausaha mandiri masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, kesulitan dalam penetrasi pasar, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, perbaikan mulai terlihat pada Tahun 2022 dengan

realisasi yang melebihi target sebesar 6,24 persen, diikuti fluktuasi pada Tahun 2023 sebelum akhirnya tercapai secara penuh di 2024. Capaian ini menggambarkan mulai efektifnya berbagai program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mendorong pelaku UMK naik kelas menjadi wirausaha mandiri. Namun, ke depan, diperlukan penguatan program inkubasi bisnis, fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta, dan pengembangan ekosistem wirausaha yang terintegrasi agar usaha kecil tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tetapi juga mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di pasar yang lebih luas.

7. Secara tren, capaian Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2020, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi masih berada di titik nol, diduga karena belum dilakukan pengukuran atau pelaporan resmi terhadap indeks ini. Memasuki Tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 50,61 poin dari target 60,00 poin (capaian 84,35 persen). Peningkatan paling tajam terjadi pada Tahun 2022, di mana realisasi melonjak hingga 72,89 poin, melampaui target sebesar 62,00 poin (capaian 117,56 persen). Capaian ini menandakan adanya lompatan besar dalam implementasi reformasi birokrasi, mungkin sebagai dampak dari percepatan digitalisasi layanan, peningkatan sistem pengawasan, atau pelaksanaan zona integritas di berbagai unit kerja. Namun demikian, capaian Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 61,92 poin, sedikit di bawah target tahunan sebesar 64,00 poin (capaian 96,75 persen). Penurunan berlanjut pada Tahun 2024 menjadi 58,71 poin, lebih rendah dari capaian 2023 maupun dari target akhir 2024 sebesar 66,00 poin. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan regulasi. Penurunan ini juga dapat disebabkan oleh lemahnya monitoring dan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

evaluasi internal, pergantian pimpinan, atau kurang optimalnya pelaksanaan zona integritas pada sebagian besar unit kerja.



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Tabel 2.9.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 203	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024 2025	2023 2024 2025 2026	2024 2025 2026 2027	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.462.912.301					12.877.856.809											
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	14.462.912.301					12.877.856.809											



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		14.462.912.301	11.595.971.967	12.125.947.168	12.465.264.644,25		12.877.856.809	11.097.992.686	10.694.407.806	11.114.886.257,00		89,04	95,71	88,19	89,17	10.130.019.216,05	9.157.028.712,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.063.069.075	860.920.700	883.972.200	437.584.750		1.027.878.155	853.011.424	88.2.145.577	425.989.950		96,69	99,08	99,79	97,35	649.109.345	637.805.021
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.185.218.341	9.211.157.290	9.475.766.743	10.000.404.922,25		8.748.426.865	8.732.320.339	8.058.746.940	8.736.712.120		85,88	94,80	85,04	84,90	7.774.509.459,25	6.855.241.253
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		108.710.075	62.847.500	69.763.850	48.112.000		91.491.350	62.197.500	69.420.000	41.611.650		80,37	98,96	99,51	86,49	57.886.685	52.944.100



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Daerah																	
Adminis- trasi Kepega- waian Perangk- at Daerah		98.880. 250	56.614. 400	75.819. 000	127.030. 950		87.688.8 50	55.259. 900	75.575. 460	124.413. 190		88, 68	97, 61	99, 68	97, 94	71.6689. 20	68.587.4 80
Adminis- trasi Umum Perangk- at Daerah		520.928 .660	409.641 .377	507.488 .975	649.525. 142		482.815. 104	407.930 .495	505.189 .802	648.971. 702		92, 68	99, 58	99, 55	99, 91	417.516. 830,80	408.981. 421
Pengad- aan Barang Milik Daerah Penunja- ng Urusan Pemerin- tah Daerah		914.181. 500	0,00	0,00	0,00		890.814. 000	0,00	0,00	0,00		97, 47	0, 00	0, 00	0,0 0	182.836. 300	178.162. 800
Penyedi- aan Jasa Penunja- ng Urusan Pemerin- tahan Daerah		535.684 .400	682.753 .700	586.946 .400	438.156. 880		532.363. 810	677.104 .558	584.756 .947	389.867. 523		99, 38	99, 17	99, 63	88, 98	448.708. 276	436.818. 568
Pemelih- araan		1.036.2 40.000	312.037 .000	526.190 .000	764.450. 000		1.016.37 8.675	310.168 .470	518.573 .080	747.320. 122		98, 08	99, 4	98, 5	97, 76	527.783. 400	518.488. 069



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0	5			
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	752.999.300,00					696.865.400,00					92,55	-	-	-	-	752.999.300,00	696.865.400,00
Pembinaan Kelembagaan Koperasi	324.301.400,00					323.441.900,00					99,73	-	-	-	-	324.301.400,00	323.441.900,00
Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	235.526.600,00					191.198.000,00					81,18	-	-	-	-	235.526.600,00	191.198.000,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi	193.171.300,00					182.225.500,00					94,33	-	-	-	-	193.171.300,00	182.225.500,00
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Simpan	0	483.267.525	88.674.200	119.998.750	119.998.800	-	477.866.675	88.027.625	118.618.750	119.698.100	0	98,88	99,27	98,85	99,75	162.387.855,00	162.387.855,00
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	291.192.000	23.674.500	29.999.100	29.999.450	-	291.192.000	23.493.425	29.819.100	29.999.450	0,00	100,00	99,24	99,40	100,00	74.973.010,00	74.900.795,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penerbitan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	192.075.525	64.999.700	89.999.650	89.999.350	-	186.674.675	64.534.200	88.799.650	89.698.650	0,00	97,19	99,28	98,67	99,67	87.414.845,00	85.941.435,00
Program Pengawasan dan	-	379.149.350,00	225.837.475,00	189.014.400,00	189.198.050,00	-	367.721.450,00	224.827.823,00	187.737.184,00	188.790.840,00	0,00	96,99	99,55	99,32	99,78	196.639.855,00	193.815.459,40



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021	2020 2021 2022 2023 2024	2021	2020 2021 2022 2023 2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeriksaan Koperasi																	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	251.434.600,00	138.987.500,00	139.175.400,00	139.175.050,00	-	246.892.675,00	138.520.110,00	139.035.330,00	139.029.090,00	0,00	98,19	99,66	99,90	99,90	133.754.510,00	132.695.441,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	-	127.714.750,00	86.849.975,00	49.839.000,00	50.023.000,00	-	120.828.775,00	86.307.713,00	48.701.854,00	49.761.750,00	-	94,61	99,38	97,72	99,48	62.885.345,00	61.120.018



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
i yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	510.565.175,00	229.034.475,00	164.999.350,00	164.999.250,00	-	488.753.856,00	224.045.662,00	164.374.801,00	164.566.480,00	-	95,73	97,82	99,62	99,74	213.919.650,00	208.348.160
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	-	510.565.175,00	229.034.475,00	164.999.350,00	164.999.250,00	-	488.753.856,00	224.045.662,00	164.374.801,00	164.566.480,00	-	95,73	97,82	99,62	99,74	213.919.650,00	208.348.160



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	
Program Peningkatan Usaha Koperasi	593.236.800					581.835.250					98,08					118.647.360	116.367.050
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	179.148.000					178.484.000					99,63					35.829.600	35.696.800
Kegiatan Peningkatan Kualitas	143.588.800					141.416.800					98,49					28.717.760	28.283.360



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sumber Daya Manusia Perkoperasian																	
Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi	270.500.000					261.934.450					96,84					54.100.000	52.386.890
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		323.508.050	156.839.800	100.000.250	80.000.100		278.374.850	149.960.180	92.261.034	79.458.100		86,05	95,61	92,26	99,32	132.069.640	120.010.832
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)		323.508.050	156.839.800	100.000.250	80.000.100		278.374.850	149.960.180	92.261.034	79.458.100		86,05	95,61	92,26	99,32	132.069.640	120.010.832



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Daerah Provinsi																	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		552.777.725	490.154.875	480.014.400	593.534.300		490.277.700	489.281.065	467.753.870	581.650.400		88,69	99,82	97,45	97,99	423.296.260	405.792.607
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		552.777.725	490.154.875	480.014.400	593.534.300		490.277.700	489.281.065	467.753.870	581.650.400		88,69	99,82	97,45	97,99	423.296.260	405.792.607
Program Peningkatan Usaha Kecil	1.041.952.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.498.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208.390.440,00	198.499.715,60
Peningkatan	242.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.358.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	0,00	0,00	0,00	0,00	122.161.040,00	45.871.780,00



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Usaha Kecil											4						
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	610.805.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.219.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	122.161.040,00	118.243.976,00
Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	188.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.919.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658.600,00	34.383.959,60
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	0,00	507.267.025,00	307.613.001,00	679.482.950,00	473.967.150,00	0,00	507.267.025,00	123.067.900,00	659.802.080,00	472.335.201,00	0,00	100,00	40,01	97,66	99,66	393.666.025,20	352.494.441,20
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui	0,00	507.267.025,00	307.485.825,00	679.482.950,00	473.967.150,00	0,00	463.078.001,00	123.067.900,00	659.802.080,00	472.335.201,00	0,00	9,13	40,02	97,10	99,66	1.306.707.685,00	343.656.636,40



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2023 2024	2021	2020 2021 2022 2023 2024	2021	2020 2021 2022 2023 2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan																	
Program Pengembangan UMKM	0,00	786.970.050,00	806.810.100,00	996.773.750,00	531.997.950,00	0,00	717.600.300,00	552.270.370,00	974.103.100,00	502.667.032,00	0,00	91,19	68,45	97,73	94,49	624.510.370,00	549.328.560,40
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan	0,00	786.970.050,00	806.810.100,00	996.773.750,00	531.997.950,00	0,00	717.600.300,00	552.270.370,00	974.103.100,00	502.667.032,00	0,00	91,19	68,45	97,73	94,49	624.510.370,00	549.328.560,40



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 2021 2022 2030	2021 2022 2023 2024	2022 2023 2024	2023 2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah																	

Sumber: Laporan Kinerja DISKOPUKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024, Data Diolah Kembali

Pada tabel di atas, diuraikan mengenai evaluasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa tahun terakhir. Penjelasan mengenai evaluasi realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dan belum memenuhi target yang direncanakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara umum, rasio antara realisasi anggaran terhadap anggaran yang ditetapkan menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup tinggi. Mayoritas kegiatan mencatat tingkat realisasi di atas 90 (Sembilan puluh) persen, yang menandakan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai alokasi anggaran.
2. Ada beberapa kegiatan menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dalam penyerapan anggaran seperti Penyusunan Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja SKPD, rata-rata realisasi sebesar 90,83 (Sembilan puluh koma delapan puluh tiga) persen, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, realisasi sebesar 97,76 (sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh enam) persen, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan realisasi sebesar 97,06 (sembilan puluh tujuh koma nol enam), Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi tata kelola dan evaluasi program yang esensial untuk perencanaan berbasis kinerja. Angka realisasi yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan perencanaan berbasis data.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menghabiskan anggaran terbesar, dengan realisasi tahunan stabil di atas 80 persen, namun masih menyisakan ruang perbaikan efisiensi. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mencatat realisasi sangat tinggi sebesar 99 persen, menunjukkan efisiensi tinggi dalam dukungan operasional sumber daya manusia.
4. Sejumlah kegiatan tidak terlaksana pada beberapa tahun terakhir, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tidak ada realisasi dari 2021–2024 meski tercantum dalam perencanaan. Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai hanya terealisasi di Tahun 2020 dengan realisasi sebesar 59,68 persen, kemudian nihil di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas belanja dari belanja modal ke belanja operasional atau kendala dalam pelaksanaan seperti proses pengadaan atau penyesuaian anggaran saat pandemi.

5. Rata-rata pertumbuhan anggaran meningkat secara bertahap dari 2020 ke 2024, namun pertumbuhan realisasi tidak selalu linear, dan di beberapa tahun justru mengalami penurunan. Administrasi keuangan perangkat daerah mengalami penurunan efisiensi dari 94,80 persen pada Tahun 2021 menjadi 84,90 persen pada Tahun 2024, menunjukkan tantangan dalam mengelola anggaran besar secara konsisten.
6. Beberapa kegiatan menunjukkan rasio konsisten dan mendekati 100 persen, antara lain, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar 99,99 persen hingga 100 persen, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD di atas 96 persen, Pengamanan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah realisasi tinggi dan stabil. Hal ini menggambarkan adanya proses perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur dan rutin setiap tahun.
7. Terdapat anggaran yang dianggarkan namun tidak terealisasi sama sekali, seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Bimbingan Teknis, dan sebagian kegiatan pengadaan fisik. Ini mencerminkan adanya kemungkinan perubahan kebijakan pasca perencanaan.
8. Pada Tahun 2020, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan terealisasi sebesar Rp743.733.200,- atau sebesar 97,76 persen jika dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun yaitu sebesar Rp760.741.700,-. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tinggi hampir mendekati 100 persen. program ini terdiri dari 3 kegiatan utama yang mana masing-masing terealisasi lebih dari 96 persen yang mana menunjukkan bahwa serapan anggaran yang tinggi.
9. Pada Tahun 2020, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi direalisasikan sebesar Rp696.865.400,- atau mencapai 92,55

persen dari target anggaran sebesar Rp752.999.300,-. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran program ini cukup tinggi. Program ini terdiri dari 3 kegiatan utama yang mana dua diantaranya memiliki capaian realisasi lebih dari 93 persen bahkan ada yang mendekati 100 persen. Namun, terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi yang memiliki capaian realisasi yang cukup yaitu sebesar 81,18 persen.

10. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam memiliki capaian realisasi yang cenderung menurun pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dimana, capaian realisasi tertinggi adalah pada tahun 2021 sebesar Rp477.866.675 dan terendah adalah pada Tahun 2022 sebesar Rp88.027.625. Sedangkan pada Tahun 2023 sampai dengan 2024 capaian realisasi hampir sama, dengan kenaikan realisasi sebesar Rp1.079.350,-. Adapun persentase capaian realisasi pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif dimana pada masing-masing tahun serapan anggaran terbilang tinggi dengan persentase diatas 95 persen. Program ini memiliki dua kegiatan utama yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Penerbitan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kedua kegiatan tersebut memiliki persentase capaian realisasi diatas 95 persen sehingga dapat dikatakan bahwa serapan anggaran tinggi. pada Tahun 2021, kedua kegiatan tersebut memiliki capaian realisasi yang cukup tinggi dan pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 capaian tersebut mengalami penurunan.
11. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki capaian realisasi yang cenderung menurun dimana capaian realisasi tertinggi adalah pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp367.721.450,- sedangkan capaian realisasi terendah adalah pada Tahun 2023 sebesar Rp184.737.184,-. Program ini memiliki dua kegiatan yaitu kegiatan

Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi dan kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, kedua kegiatan ini memiliki persentase capaian realisasi yang tinggi dimana keduanya memiliki capaian lebih dari 95 persen.

12. Pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki capaian realisasi yang cenderung menurun, dimana capaian realisasi tertinggi pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp488.753.856,- dan realisasi terendah pada Tahun 2023 sebesar Rp164.374.801,-. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan inti yaitu Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini memiliki persentase capaian realisasi yang cukup fluktuatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dengan rata-rata persentase capaian realisasi adalah sebesar 98,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran pada kegiatan ini tinggi dimana setiap tahunnya persentase capaian realisasi di atas 95 persen.
13. Pada Tahun 2020, Program Peningkatan Usaha Koperasi telah memenuhi target yang direncanakan, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp593.236.800 dan realisasi Rp581.835.250, menghasilkan rasio realisasi sebesar 98,08 persen. Ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan efisien. Rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai Rp118.647.360, sedangkan realisasi tumbuh rata-rata Rp116.367.050 per tahun;
14. Pada Tahun 2021 hingga 2024, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian telah memenuhi target yang direncanakan hal ini menunjukkan pelaksanaan yang cukup konsisten. Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp323.508.050 mengalami penurunan di Tahun 2024

menjadi Rp80.000.100. Realisasi juga menunjukkan hal yang sama mengalami penurunan di Tahun 2021 Rp278.374.850 menjadi Rp79.458.100 di Tahun 2024. Rasio realisasi berada antara 86,05 persen hingga 99,32 persen, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien. Rata-rata pertumbuhan anggaran adalah Rp132.069.640 dan realisasi Rp120.010.832 pertahun;

15. Tahun 2021 hingga 2024, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi telah memenuhi target yang direncanakan dengan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp552.777.725 mengalami kenaikan di Tahun 2024 menjadi Rp593.534.300. Realisasi juga menunjukkan hal yang sama mengalami Kenaikan di Tahun 2021 Rp490.277.700 menjadi Rp581.650.400 di Tahun 2024. Rasio realisasi berada antara 88,69 persen hingga 97,99 persen, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien. Rata-rata pertumbuhan anggaran adalah Rp423.296.260 dan realisasi Rp405.792.607 pertahun.
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) mulai didanai sejak Tahun 2021. Pada tahun tersebut, seluruh anggaran sebesar Rp507.267.025 direalisasikan secara penuh (100 persen). Namun, pada Tahun 2022, dari alokasi sebesar Rp307.613.001, hanya Rp123.067.900 yang terealisasi (rasio hanya 40,01 persen). Hal ini menunjukkan penurunan drastis dalam serapan anggaran. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan realisasi Rp659.802.080 dari anggaran Rp679.482.950 (rasio 97,66 persen). Pada 2024, kembali terjadi perbaikan signifikan dengan rasio serapan sebesar 99,66%. Rata-rata pertumbuhan anggaran dalam program ini mencapai Rp393.666.025,20, sedangkan realisasi rata-rata Rp352.494.441,20, mengindikasikan pemulihan dalam efektivitas penggunaan anggaran.
17. Program Pengembangan UMKM menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan anggaran yang signifikan dari Rp786.970.050 pada 2021 menjadi Rp996.773.750 pada 2023, walaupun menurun menjadi Rp531.997.950 pada 2024. Realisasi juga menunjukkan tren

meningkat hingga hampir seluruh anggaran terealisasi pada 2023 (97,73 persen) dan tetap tinggi pada 2024 (94,49 persen). Namun, Tahun 2022 mencatat rasio realisasi hanya 68,45%, menandakan kemungkinan kendala dalam pelaksanaan kegiatan saat itu. Rata-rata realisasi dalam periode ini mencapai Rp549.328.560,40.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memegang peranan strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Peran Perangkat Daerah ini sangat penting karena Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan dan penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga selaras dengan agenda prioritas nasional, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan sejumlah kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan program dan layanannya. Kelompok pertama adalah pelaku usaha mikro, yaitu individu atau rumah tangga yang menjalankan usaha skala kecil dengan berbagai keterbatasan, seperti akses terhadap permodalan, pemasaran, dan legalitas usaha. Selanjutnya adalah pelaku usaha kecil yang memiliki potensi untuk berkembang, namun masih memerlukan dukungan dalam hal peningkatan kapasitas usaha dan manajerial. Pelaku usaha menengah juga menjadi sasaran penting, mengingat mereka telah memiliki struktur usaha yang relatif mapan, namun membutuhkan fasilitasi untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong daya saing yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun global.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

**Gambar 2.3. Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah**

Selain pelaku usaha perorangan, koperasi juga menjadi fokus utama pelayanan. Hal ini mencakup koperasi aktif yang perlu didorong agar semakin berkualitas dan berdaya saing, koperasi dalam pembinaan yang masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, serta koperasi yang memerlukan reformasi struktural dan manajerial untuk dapat berfungsi secara optimal. Dinas juga menaruh perhatian pada calon wirausaha dan wirausaha pemula, yakni kelompok masyarakat yang baru memulai atau bahkan belum memiliki usaha. Mereka membutuhkan intervensi berupa pelatihan keterampilan dasar, pendampingan intensif, dan akses permodalan awal agar dapat berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri.

Tidak kalah penting, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga melibatkan lembaga-lembaga pendukung Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam ekosistem pemberdayaan, seperti lembaga keuangan mikro, inkubator bisnis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta komunitas-komunitas wirausaha.

Lembaga-lembaga ini memegang peran penting dalam mendampingi, memfasilitasi, dan memperkuat struktur pendukung di sekitar pelaku usaha agar pembangunan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Adapun sasaran layanan strategis yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi tujuh area utama. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi yang sehat, melalui pembinaan manajemen kelembagaan, tata kelola organisasi, dan peningkatan akuntabilitas koperasi, serta mendorong koperasi untuk rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kedua, peningkatan kapasitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui berbagai pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen, sertifikasi produk, digitalisasi usaha, fasilitasi perizinan, serta penguatan branding dan pemasaran, baik secara digital maupun konvensional.

Sasaran ketiga adalah peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilakukan melalui fasilitasi ke lembaga keuangan perbankan dan non-bank, penyaluran bantuan modal usaha, pemberian subsidi bunga, serta integrasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keempat, penguatan ekosistem kewirausahaan dan inkubasi bisnis, melalui pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis serta penguatan kolaborasi lintas sektor dengan dunia usaha, akademisi, dan lembaga pendamping. Kelima, peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi inovatif di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang diimplementasikan dalam bentuk pelatihan e-commerce, pemasaran digital, serta pemanfaatan teknologi produksi yang lebih efisien dan kompetitif.

Sasaran keenam adalah penguatan kelembagaan dan jejaring usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan fokus pada pembentukan dan penguatan asosiasi atau komunitas pelaku usaha, serta menjalin kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta. Terakhir, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transformasi digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian layanan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi: (a) perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil; (c) pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum; (d) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur; dan (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

Selama beberapa tahun terakhir, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal, meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan tersebut, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah tetap terjamin.

Adapun hasil identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Masih Rendahnya Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam
			Masih Rendahnya Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
		Rendahnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rendahnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
			Rendahnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
		Rendahnya Jumlah Koperasi Sehat	Rendahnya Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi
		Masih Rendahnya Kualitas SDM Perkoperasian	Masih Rendahnya Dukungan Fasilitasi Pelatihan Kepada Koperasi
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi yang Berkualitas
			Rendahnya Penyediaan Modul Pelatihan Perkoperasian
		Rendahnya Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Rendahnya Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Rendahnya Produktivitas Koperasi	Rendahnya Pertumbuhan Jumlah Koperasi Berkualitas



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Rendahnya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Masih Rendahnya Fasilitas Perizinan Usaha Bagi Pelaku Usaha
		Rendahnya Pelaku Usaha yang Memiliki Kemampuan Mengakses Sumber Daya Produktif Usaha	Rendahnya Cakupan Pemberdayaan UMKM
		Rendahnya Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Masih Rendahnya Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan Kepada UMKM
		Rendahnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Rendahnya Cakupan Pengembangan UMKM
3	Rendahnya Rasio Kewirausahaan	Rendahnya Pertumbuhan Wirausaha	Masih Rendahnya Dukungan Fasilitas Pelatihan Kepada Wirausaha
		Rendahnya Jumlah Wirausaha Baru	Masih Rendahnya Dukungan Fasilitas Pengembangan Usaha Kepada Calon Wirausaha
		Masih Rendahnya Kualitas SDM UMKM	Masih Rendahnya Dukungan Fasilitas Pelatihan Kepada Pelaku UMKM
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan UMKM yang Berkualitas
			Rendahnya Penyediaan Modul Pelatihan UMKM
4	Rendahnya Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Rendahnya Indeks Reformasi Perangkat Daerah General	Belum Optimalnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Masih Rendahnya Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah
			Rendahnya Nilai Kematangan Statistik Sektoral Pada Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP
			Rendahnya Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan
			Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
			Rendahnya Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK
			Rendahnya Nilai Kematangan Penerapan SPBE Pada Perangkat Daerah
			Masih Rendahnya Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah
			Rendahnya Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
			Belum Optimalnya Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor
			Rendahnya Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE
			Rendahnya Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
			Rendahnya Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi SKM Terintegrasi
			Belum Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
		Belum Optimalnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM	Belum Optimalnya Pemenuhan Layanan Administrasi Umum UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM
			Belum Optimalnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM
			Belum Optimalnya Ketersediaan Aset Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dalam Kondisi Baik

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi masih tergolong rendah. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi produksi belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi produktif di tingkat lokal maupun regional. Koperasi sektor produksi, yang idealnya berperan besar dalam pengolahan komoditas unggulan daerah (seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kecil), justru masih kalah dominan dibandingkan koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen yang cenderung bergerak di sektor jasa dan perdagangan.

**PROPORSI VOLUME USAHA KOPERASI SEKTOR PRODUKSI
TERHADAP TOTAL VOLUME USAHA**

Definisi Operasional:

Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Merupakan Perbandingan Besaran Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Seluruh Besaran Volume Usaha Koperasi Pada Tahun Berkenaan. Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Adalah Total Nilai Transaksi yang Dihasilkan Oleh Koperasi yang Bergerak Dalam Bidang Produksi Barang dan/atau Jasa Selama Periode Tertentu. Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Mencakup Seluruh Pendapatan Kotor (Omzet) Dari Hasil Penjualan Produk, Penyediaan Jasa Produksi, Serta Aktivitas Pendukung Lainnya yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha.

Formula Perhitungan:

Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Thn n : Volume Usaha Koperasi Thn n x 100%

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha	N/A	65,31%

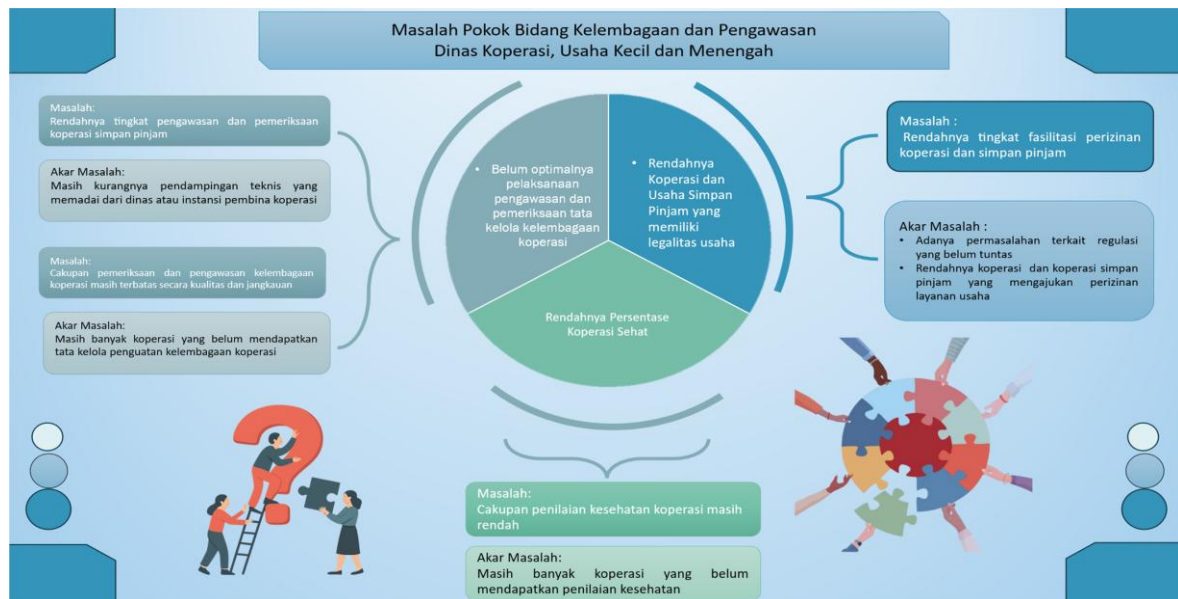
Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 2.4. Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Secara substantif, volume usaha koperasi sektor produksi memiliki peranan penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan koperasi dalam mengelola potensi sumber daya anggotanya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Semakin besar volume usaha yang dicapai, semakin terlihat kemampuan koperasi dalam mengoptimalkan produksi, memperluas jaringan pasar, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi anggotanya. Tingginya volume usaha juga berkorelasi dengan potensi peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dibagikan kepada anggota, sehingga menciptakan insentif bagi anggota untuk terus aktif berkontribusi dalam proses produksi maupun pemasaran. Lebih dari itu, volume usaha koperasi sektor produksi menjadi salah satu indikator kontribusi koperasi

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya dalam sektor-sektor yang berbasis produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, kerajinan, dan manufaktur skala kecil.

Masalah Pokok Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

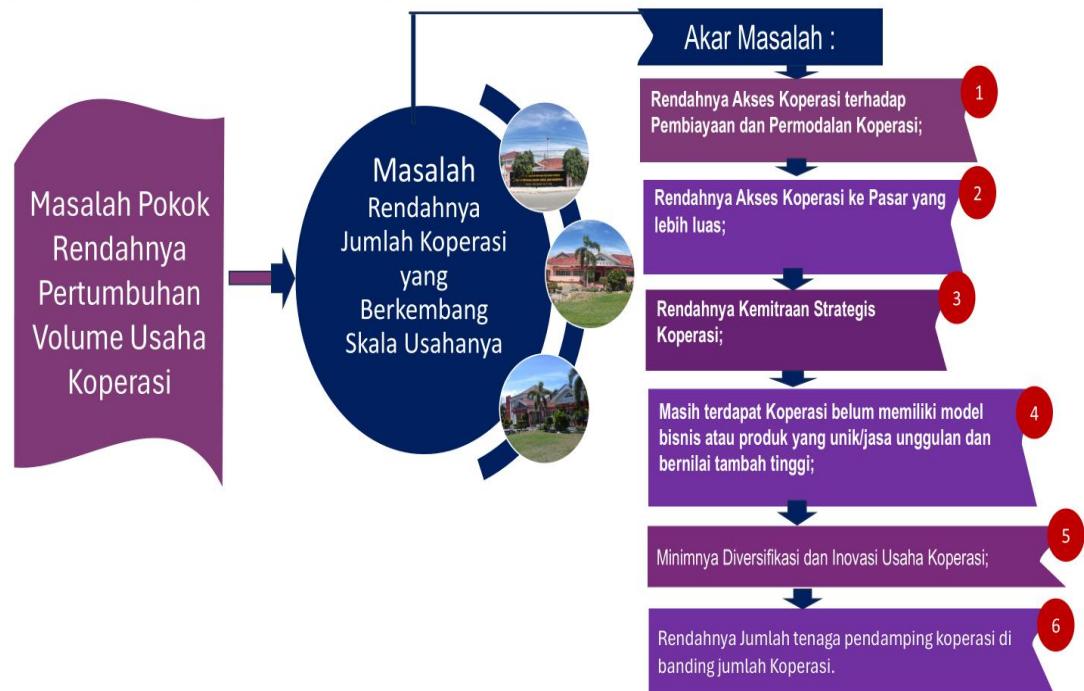


Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 2.5. Analisis Permasalahan Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Dari Aspek Kelembagaan dan Pengawasan

Keberhasilan meningkatkan volume usaha koperasi sektor produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemampuan manajemen dalam mengelola proses produksi, kualitas produk yang dihasilkan, tingkat inovasi, ketersediaan teknologi, akses terhadap bahan baku, modal usaha, serta kemampuan koperasi dalam menembus pasar. Tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, keterbatasan jaringan pemasaran, hingga ketidakmampuan memenuhi standar kualitas pasar. Oleh karena itu, strategi pengembangan koperasi sektor produksi harus diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota, serta pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran.

HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN PADA UNIT KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 2.6. Analisis Permasalahan Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Dari Aspek Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

Proporsi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterlibatan dan kontribusi usaha kecil dan menengah dalam perekonomian suatu wilayah, baik dari sisi jumlah unit usaha, tenaga kerja yang diserap, maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Proporsi ini menggambarkan sejauh mana usaha kecil dan menengah berperan sebagai pilar ekonomi lokal dan nasional dibandingkan dengan usaha besar atau korporasi. Dengan kata lain, proporsi usaha kecil dan menengah menjadi indikator kuantitatif dan kualitatif untuk menilai dominasi, efektivitas, dan keberlanjutan peran usaha kecil dan menengah dalam menggerakkan roda ekonomi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa proporsi usaha kecil dan menengah di berbagai daerah masih tergolong

rendah jika dibandingkan dengan potensi sumber daya manusia dan potensi ekonomi lokal yang tersedia.

PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH

Definisi Operasional:

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Merupakan Perbandingan Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Seluruh Unit Usaha Pada Tahun Yang Sama. Skala Usaha Kecil dan Menengah Didasarkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Tersebut, Usaha Mikro Mencakup Modal Usaha Paling Banyak 1 Milyar Rupiah dan Hasil Penjualan Tahunan Paling Banyak 2 Milyar Rupiah, Usaha Kecil Mencakup Modal Usaha Paling Banyak 1-5 Milyar Rupiah dan Hasil Penjualan Tahunan Paling Banyak 2-15 Milyar Rupiah, dan Usaha Menengah Mencakup Modal Usaha Paling Banyak 5-10 Milyar Rupiah dan Hasil Penjualan Tahunan Paling Banyak 15-50 Milyar Rupiah.

Formula Perhitungan:

Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Thn n : Jumlah Unit Usaha Thn n x 100%

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	N/A	65,31%

Sumber: Kementerian UMKM Republik Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

**Gambar 2.7. Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah
Berdasarkan Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024**

Secara lebih mendalam, proporsi usaha kecil dan menengah yang besar memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Tingginya proporsi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada usaha besar, tetapi juga tersebar luas hingga ke masyarakat skala kecil dan menengah. Kondisi ini menciptakan peluang kerja bagi banyak orang, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat basis ekonomi lokal. Selain itu, proporsi usaha kecil dan

menengah yang tinggi mencerminkan adanya potensi kewirausahaan yang berkembang di masyarakat, kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya lokal, serta kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Namun demikian, proporsi usaha kecil dan menengah yang besar juga menuntut perhatian terhadap kualitas dan daya saing, karena sebagian besar usaha kecil dan menengah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, manajemen, teknologi, serta akses pasar. Oleh karena itu, peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah tidak cukup hanya dari sisi jumlah, tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas usaha agar usaha kecil dan menengah mampu berkontribusi lebih besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 2.8. Analisis Permasalahan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan hasil identifikasi, rasio kewirausahaan di sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masih menunjukkan angka yang rendah dan belum mencerminkan ekosistem kewirausahaan yang sehat dan inklusif. Rasio kewirausahaan



daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan di suatu wilayah dengan membandingkan jumlah wirausaha terhadap jumlah penduduk produktif atau total angkatan kerja di daerah tersebut. Rasio ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase dan berfungsi sebagai ukuran kuantitatif untuk menilai seberapa besar minat, inisiatif, dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan usaha secara mandiri.

Rasio kewirausahaan menjadi penting karena keberadaan wirausaha tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka peluang pekerjaan bagi orang lain, meningkatkan produksi barang dan jasa, memperluas basis ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio kewirausahaan di suatu wilayah, semakin menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan adaptasi terhadap peluang ekonomi, inisiatif inovatif, serta kesiapan untuk berkompetisi di pasar lokal maupun nasional.

RASIO KEWIRAUSAHAAN

Definisi Operasional:

Rasio Kewirausahaan Merupakan Perbandingan Jumlah Orang yang Berusaha Dibantu Buruh Tetap Pada Dengan Total Angkatan Kerja Tahun Yang Sama. Berusaha Dibantu Buruh Tetap Atau Buruh Dibayar Adalah Berusaha Atas Resiko Sendiri dan Mempekerjakan Paling Sedikit Satu Orang Buruh atau Pekerja Tetap Yang Dibayar. Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja Adalah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun – 65 Tahun) Yang Bekerja, atau Punya Pekerjaan Namun Sementara Tidak Bekerja dan Pengangguran.

Formula Perhitungan:

Jumlah Angkatan Kerja Berusaha Dibantu Buruh Tetap Thn n / Total Angkatan Kerja Thn n x 100%

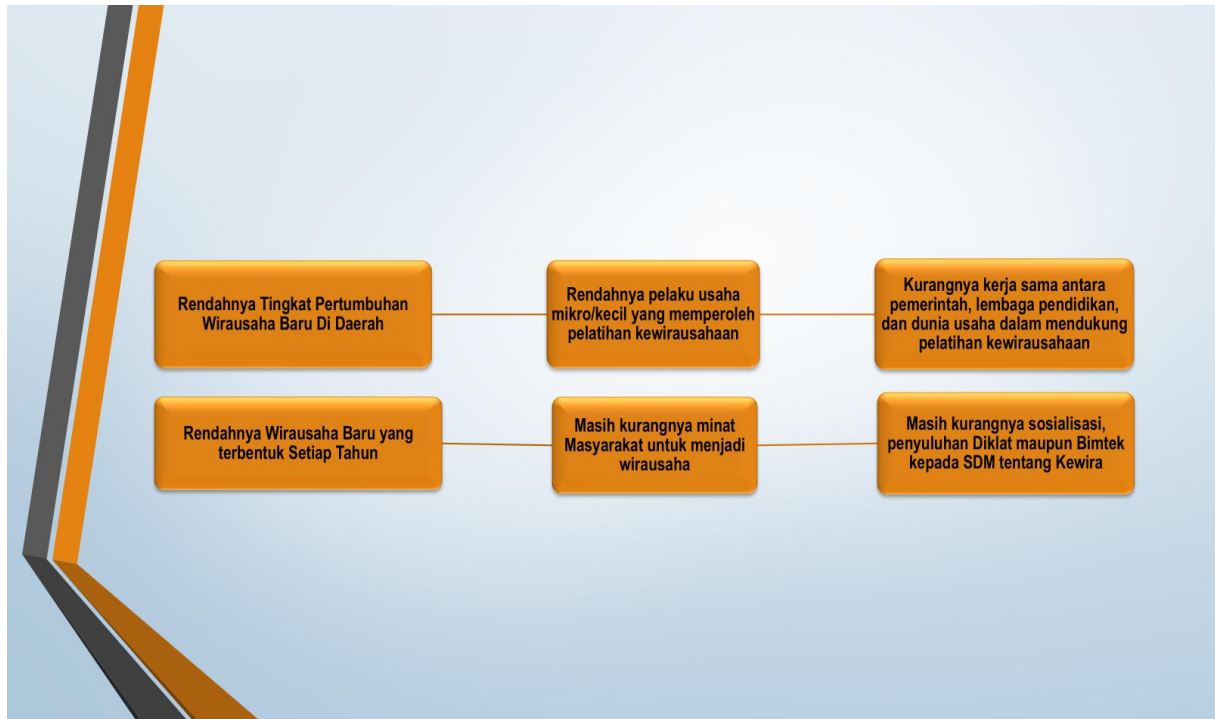
URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Rasio Kewirausahaan	2,97%	3,19%

Sumber: Kementerian UMKM Republik Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Gambar 2.9. Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Secara substansial, rasio kewirausahaan daerah mencerminkan kondisi ekosistem ekonomi di wilayah tersebut. Daerah dengan rasio kewirausahaan yang tinggi biasanya memiliki lingkungan usaha yang kondusif, termasuk ketersediaan infrastruktur, akses permodalan, teknologi, sumber daya manusia yang terampil, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan usaha. Selain itu, keberadaan lembaga pendukung seperti koperasi, lembaga inkubator bisnis, pelatihan kewirausahaan, dan jaringan kemitraan usaha turut memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha. Sebaliknya, rasio kewirausahaan yang rendah menandakan bahwa masih terdapat hambatan signifikan bagi masyarakat untuk menjadi wirausaha, seperti terbatasnya modal, kurangnya akses pasar, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan manajerial, serta rendahnya dukungan pemerintah atau budaya kewirausahaan yang lemah. Hal ini dapat

mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan formal atau sektor publik, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kurang dinamis dan kurang inklusif.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 2.10. Analisis Permasalahan Rasio Kewirausahaan

Arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ditingkat Perangkat Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan memilah fokus utama pada pencapaian indikator kinerja sasaran dan kebijakan yang termuat dalam Reformasi Birokrasi General.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi

pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah. Dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tata kelola pada level Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level Perangkat Daerah.

INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Definisi Operasional:

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Merupakan Indikator Komposit Yang Menggambarkan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Level Perangkat Daerah. Indikator Ini Digunakan Sebagai Ukuran Keberhasilan Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah Bertujuan Memberikan Arahan Kepada Perangkat Daerah Mengenai Perubahan Yang Ingin Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi, Yaitu Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Dan Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Formula Perhitungan:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Reviu APIP Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

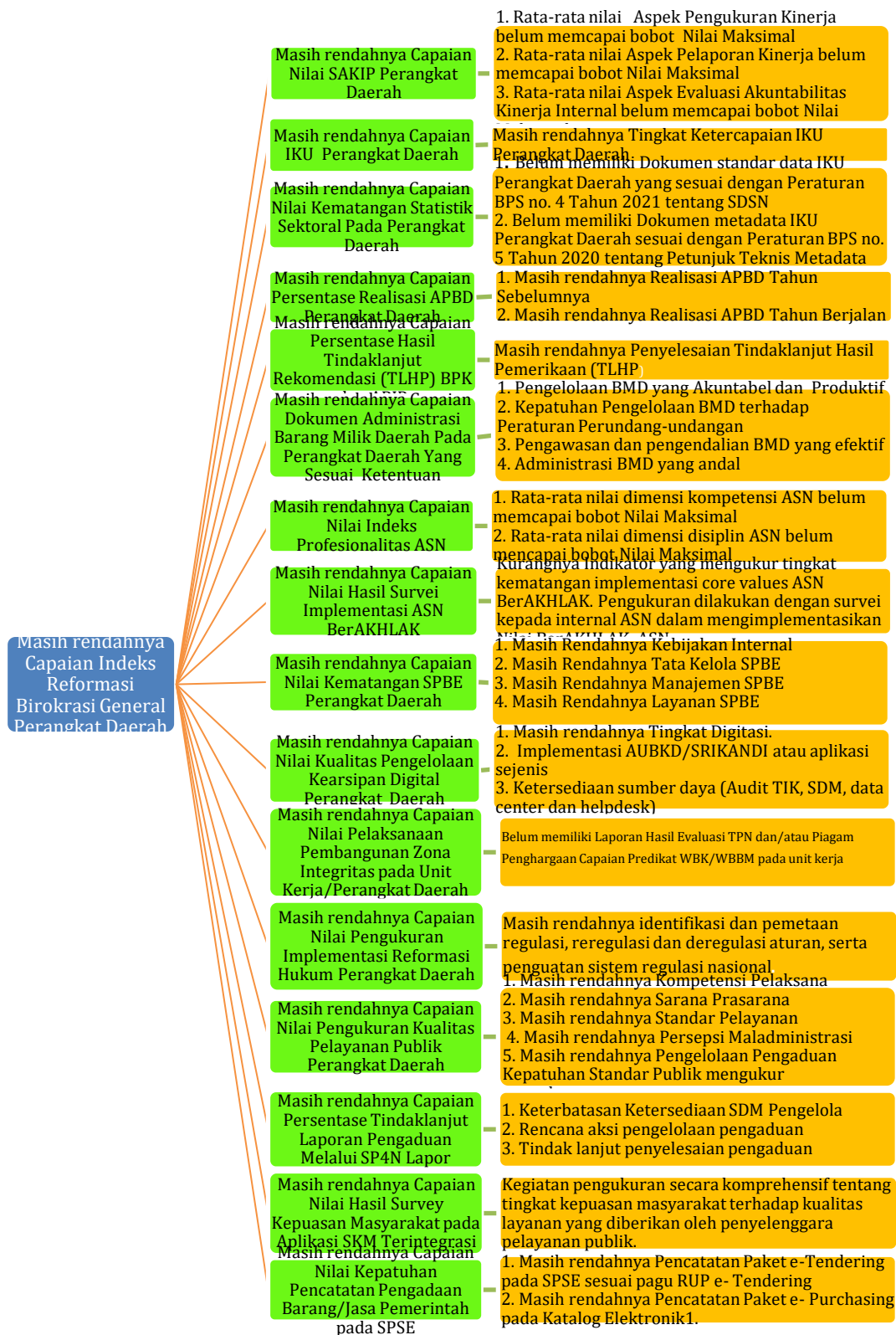
URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,92	58,71

Sumber: Biro Organisasi SETDA Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

**Gambar 2.11. Definisi Operasional dan Realisasi Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023-2024**

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Merupakan Indikator Komposit Yang Menggambarkan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Level Perangkat Daerah. Indikator Ini Digunakan Sebagai Ukuran Keberhasilan Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Kebijakan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah Bertujuan Memberikan Arahan Kepada Perangkat Daerah Mengenai Perubahan Yang Ingin Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi, Yaitu Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Dan Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berjalan selama periode sebelumnya merupakan kegiatan berkelanjutan yang telah diprogramkan. Selama masa pelaksanaan tersebut, didapatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam perkembangannya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan sejumlah program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat program reformasi birokrasi yang belum berjalan dengan optimal, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, sehingga perlunya penyempurnaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dimasa mendatang.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 2.12. Analisis Permasalahan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berangkat dari harapan dan cita-cita seluruh masyarakat agar Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih menetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Berani : Memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang sejahtera.
- Sulawesi Tengah : Daerah dengan luas wilayah 61.605,718 km² yang memiliki potensi unggulan dan sumber daya alam yang melimpah.
- Pertanian : Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan potensi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura untuk mewujudkan swasembada pangan.
- Industri : Sulawesi Tengah sebagai daerah hilirisasi industri yang berbasis sumber daya alam.
- Maju : Mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dengan strategi meningkatkan kualitas SDM yang sehat dan cerdas, meningkatkan PAD, menyediakan lapangan kerja, meringankan beban masyarakat dan memperbaiki tata kelola layanan publik.
- Berkelanjutan : Membangun Sulawesi Tengah dengan dasar yang telah dibangun oleh para pemimpin terdahulu dengan

menerapkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Sesuai dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih periode 2025-2029, secara eksplisit pembangunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah turut mendukung pelaksanaan Misi ke-2 yakni, “Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”. Penjelasan Misi ke-2 tersebut dimaknai bahwa ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin semua harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun hasil identifikasi atas faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan	Rendahnya Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi	Kurangnya pemahaman tentang kewenangan pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang diatur regulasi	Komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kerjasama yang lebih solid antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan koperasi di Sulawesi Tengah
			Kurangnya dukungan dalam meningkatkan kompetensi aparatur di bidang Koperasi.	Adanya dukungan Kementerian Koperasi melaksanakan peningkatan kompetensi fungsional Pengawas Koperasi
			Rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholders lainnya dalam pemberdayaan koperasi cukup tinggi
			Kurangnya informasi tentang keberadaan Koperasi Syariah di Kabupaten/Kota	Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus membangun dan mengembangkan koperasi konvensional maupun koperasi syariah



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Kurangnya pemahaman anggota koperasi tentang fungsi RAT	Adanya komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pelatihan perkoperasian melalui Perangkat Daerah terkait
			Keterbatasan kapasitas manajemen koperasi dalam mengelola kinerja keuangan dan permodalan koperasi	Adanya komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan pengelolaan kinerja keuangan dan permodalan bagi pengelola koperasi
		Rendahnya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Masih rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan dan pengalaman UMKM	Adanya komitmen Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan
			Kurangnya informasi tentang Pelaku UMKM yang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	Pembinaan dan pelatihan UMKM melalui Perangkat Daerah terkait
			Belum dimilikinya data seluruh potensi UMKM	Besarnya komitmen Pemerintah dalam pembinaan UMKM berbasis data
			Masih adanya ego sektoral diantara stakeholder diantara pembina	Besarnya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kerjasama diantara stakeholder yang lebih solid dalam pembinaan UMKM
			Banyak usaha mikro dan kecil terkendala izin	Kemajuan teknologi informasi untuk



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			usaha	dimanfaatkan dalam memfasilitasi perizinan dan pengembangan UMKM
			Kurangnya informasi bagi pelaku UMKM terkait dengan akses permodalan, rendahnya kemampuan dalam IPTEK	Memanfaatkan teknologi informasi untuk sosialisasi berbagai akses permodalan berkenaan dengan UMKM
			Sertifikasi BPOM dan Halal berbayar	Upaya Pemerintah untuk memfasilitasi kemudahan memperoleh sertifikasi tanpa berbayar
			Sempitnya pemahaman tentang kewenangan yang diatur regulasi	Komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kerjasama yang lebih solid antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan UMKM di Sulawesi Tengah
		Rendahnya Rasio Kewirausahaan	Wirausaha belum menjadi pilihan karier utama, terutama bagi generasi muda	Adanya Program Inovasi “Berani Wirausaha Baru” yang menyasar pada tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
			Minimnya figur wirausaha sukses yang menginspirasi di daerah	Adanya pelatihan penumbuhan jiwa kewirausahaan dengan menghadirkan

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				narasumber yang telah berpengalaman
			Inkubator bisnis dan ruang kolaborasi belum berkembang di daerah	Adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam pembentukan lembaga inkubasi
			Kurangnya sinergi antar-instansi dalam pengembangan kewirausahaan	Pembentukan forum koordinasi antar Perangkat Daerah terkait Program Inovasi “Berani Wirausaha Baru”
			Banyak calon wirausaha tidak memiliki literasi keuangan memadai	Dukungan pelatihan manajemen usaha dan tata kelola keuangan kepada calon wirausaha
			Skema pembiayaan wirausaha pemula tidak banyak tersedia, terutama untuk yang belum bankable	Adanya Program Inovasi “Berani Akses Pembiayaan” dengan memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha sebesar 6 persen kepada wirausaha pemula ketika mengakses KUR
			Belum tersedia database kewirausahaan daerah yang lengkap dan terintegrasi	Dukungan Badan Pusat Statistik terhadap pendataan wirausaha melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Analisis Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi: 1. apakah capaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; dan 2.

apakah tingkat capaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi melebihi/sama/kurang dari sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Hasil review terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi periode berikutnya.

Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia akan berupaya untuk melakukan koordinasi dan pengendalian beserta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Harapan selanjutnya adalah untuk mendorong masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Visi Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah:

“Terwujudnya UMKM Naik Kelas Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan itu, pengertian kata kontribus UMKM dan Naik Kelas terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kontribusi UMKM : Keterlibatan yang nyata UMKM yang memiliki nilai-nilai yang adaptif, produktif, dan berdaya saing sebagai penerang; dan

Naik Kelas : Mendukung ketercapaian transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Misi Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Peran UMKM Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Kelembagaan dan Tata Kelola Kementerian UMKM yang Profesional dan Berkinerja Baik.

Memperhatikan Visi-Misi Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia di atas, terlihat bahwa peran, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

sangat krusial dan esensial dalam mendukung pencapaian hal tersebut. Akan tetapi perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan, agar dapat menjadi input dalam merumuskan isu-isu strategis yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pencapaian Visi-Misi Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Memperkuat Peran UMKM Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Rendahnya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Sebagian besar UKM di daerah masih berstatus informal	Fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
			UKM sering menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha karena persyaratan kredit yang ketat, bunga tinggi, atau keterbatasan jaminan	Pendampingan akses pembiayaan (BISLAF) dan optimalisasi pembiayaan rantai pasok
			Banyak pelaku UKM belum memiliki keterampilan manajerial, pemasaran, dan teknis yang memadai untuk mengelola usaha secara efektif	Dukungan pengembangan kapasitas pelaku UKM melalui pendidikan dan pelatihan
			UKM kesulitan memperluas pasar akibat keterbatasan jaringan distribusi dan pemasaran yang kurang efektif	Mendorong kemitraan UKM dengan PMDN dan PMA maupun kemitraan dengan Perusahaan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				Retail, Usaha Besar, dan BUMN
		Rendahnya Rasio Kewirausahaan	Belum terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang kondusif	Pengembangan dan penguatan ekosistem kewirausahaan melalui program EntrepreneurHub (E-Hub)
			Minimnya pengetahuan inovasi di kalangan wirausaha	Fasilitasi pendampingan inovasi bagi wirausaha melalui E-Hub Development
			Kurangnya dukungan inkubasi usaha yang memadai	Pembinaan dan penguatan lembaga incubator melalui platform Sipensi dan E-Hub Incubase
			Terbatasnya pembiayaan yang dapat diakses oleh calon wirausaha	Adanya perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui E-Hub Finance

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Provinsi. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangkawaktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Penumbuhan usaha-usaha

baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis.

Salah satu strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran dalam meningkatkan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar. Adapun pada pengembangannya proses pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh efektifitas koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Luasnya wilayah mencakup 12 Kabupaten dan 1 Kota serta medan yang sulit juga menjadi tantangan dalam jangkauan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinggungan dengan pemanfaatan ruang wilayah (spasial) harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Hal ini yang harus menjadi pemahaman seluruh pemangku kepentingan karena konsep pembangunan (berbagai sektor) berbasis spasial/kewilayahan sudah menjadi *mainstream* di dunia.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, berkaitan dengan strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Sulawesi Tengah berperan dalam meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar, berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah ditinjau dari implikasi pada berbagai aspek. Adapun Faktor penghambat dan pendorongnya antara lain:

Tabel 2.13.
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Perwujudan Struktur Ruang			
	1. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah; 2. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan	1. Rendahnya Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi; 2. Rendahnya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah; 3. Rendahnya Rasio Kewirausahaan	1. Belum memadainya kapasitas ASN khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang beradadi Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan Tata Ruang Daerah; 2. Belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan perda tata ruang daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang bagi para	1. Pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga hal dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan UKM; 2. Rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya lokal; 3. Pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			stakeholder, dalam bentuk rencana detail tata ruang (RDTR); 3. Masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan	konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga hal dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan UKM
	Perwujudan Pola Ruang			
	1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Pengolahan; 2. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Pariwisata; 3. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan; 4. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kelautan; 5. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan dan pertumbuhan ekonomi	1. Rendahnya Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi; 2. Rendahnya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah; 3. Rendahnya Rasio Kewirausahaan	1. Lemahnya Koordinasi antar sektor terkait pemanfaatan ruang berbasis potensi sumberdaya; 2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya pemanfaatan pola ruang dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan potensi Koperasi dan UMKM	Tingginya Komitmen Pemerintah Provinsi untuk mensinergikan semua lini sektor dalam rangka pengembangan kawasan berbasis potensi sumberdaya yang akan berdampak pada perkembangan Koperasi dan UMKM pada wilayah pengembangannya sebagaimana pemanfaatan pola ruang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Adapun hasil identifikasi isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	4	5
	Rendahnya Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total		Perkembangan Teknologi Digital dan Transformasi Ekonomi	Perkembangan Infrastruktur Digital dan Akses Teknologi	Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas	Kesenjangan Akses Teknologi dan Digitalisasi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	4	5
	Volume Usaha Koperasi					
	Rendahnya Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah		Globalisasi dan Perubahan Pola Perdagangan	Kebijakan dan Regulasi Pendukung Koperasi dan UMKM	Keanekaragaman Sosial Budaya dan Potensi Lokal	Regulasi dan Kebijakan yang Kurang Adaptif
	Rendahnya Rasio Kewirausahaan		Dampak Perubahan Iklim dan Keberlanjutan	Ketimpangan Ekonomi dan Disparitas Regional	Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketimpangan dan Disparitas Wilayah
			Perubahan Demografi dan Preferensi Konsumen	Tantangan Akses Pembiayaan dan Inklusi Keuangan	Kerentanan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Tantangan Pembiayaan dan Inklusi Keuangan
			Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik	Dinamika Pasar Domestik dan Perilaku Konsumen	Potensi Sumber Daya Alam dan Agribisnis	Perubahan Lingkungan dan Risiko Bencana
			Akses Pendanaan dan Inklusi Keuangan	Pengaruh Pandemi dan Krisis Ekonomi Global	Persaingan Pasar dan Integrasi Regional	Perubahan Preferensi Pasar dan Konsumen
				Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan Lokal	Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis yang telah diuraikan dalam rangka pencapaian tujuan maupun sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di atas maka

isu strategis periode jangka menengah dalam pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain terkait:

1. Kesenjangan Akses Teknologi dan Digitalisasi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menghadapi tantangan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang menghambat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan usaha, pemasaran, dan akses pembiayaan, sehingga diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini;
2. Regulasi dan Kebijakan yang Kurang Adaptif
Perubahan regulasi yang tidak konsisten dan birokrasi yang kompleks menghambat pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menuntut adanya penyederhanaan prosedur dan penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha serta mendorong iklim usaha yang kondusif;
3. Ketimpangan dan Disparitas Wilayah
Perbedaan tingkat pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses pasar antar wilayah menyebabkan disparitas yang signifikan dalam perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk memperkuat ekonomi daerah secara merata;
4. Tantangan Pembiayaan dan Inklusi Keuangan
Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan utama bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk tumbuh dan berkembang, sehingga penting untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan edukasi keuangan yang menyeluruh;
5. Perubahan Lingkungan dan Risiko Bencana
Dampak perubahan iklim dan risiko bencana alam menuntut Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan dan adaptif agar mampu bertahan serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang tangguh;



6. Perubahan Preferensi Pasar dan Konsumen

Perubahan pola konsumsi yang semakin mengarah pada produk lokal berkualitas, ramah lingkungan, dan beretika membuka peluang sekaligus menuntut Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan inovasi produk dan peningkatan daya saing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

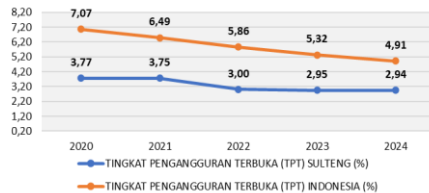
3.1. Tujuan dan Sasaran

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut, diketahui bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat berperan secara maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh seluruh komponen pembangunan nasional termasuk didalamnya adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah perlu merumuskan berbagai langkah-

langkah strategis dalam pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sulawesi Tengah.

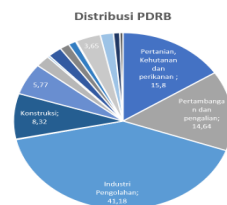
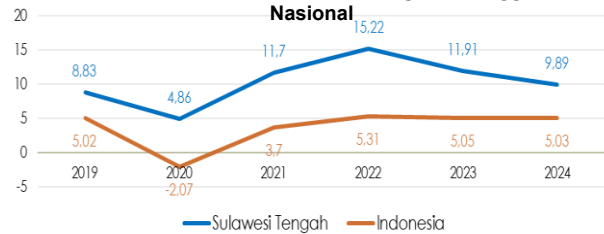
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulteng dan Nasional, Tahun 2020-2024



Relevansi Pembangunan Koperasi dan UMKM di Sulawesi Tengah

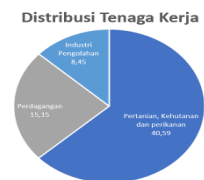
Pembangunan di sektor Koperasi dan UMKM sangat penting untuk menjawab tantangan daerah, seperti perlambatan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah menurun dari 11,91% (2023) menjadi 9,89% (2024), sementara pengangguran terbuka sedikit turun dari 2,95% menjadi 2,94%. Koperasi dan UMKM berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja, sehingga membantu menurunkan angka pengangguran di daerah.

Selama Tahun 2019-2024 LPE Sulteng lebih tinggi dari Nasional



PDRB Provinsi Sulawesi Tengah terbesar pada Industri Pengolahan sebesar 41,18%

Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah terbanyak pada lapangan kerja utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 40,59%



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.1. Relevansi Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Dalam Mengatasi Tantangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih periode 2025-2029, secara eksplisit pembangunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah turut mendukung pelaksanaan Misi ke-2 yakni, “Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”. Penjelasan Misi ke-2 tersebut dimaknai bahwa ekonomi kerakyatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi potensi lokal, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin semua harga kebutuhan pokok masyarakat dapat

terjangkau. Kemudian lebih lanjut, Misi ke-2 tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis, yang salah satunya pada Tujuan 2 “Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah” dan Sasaran Strategisnya adalah “Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Peningkatan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut diukur melalui indikator kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB.

MISI 2 :

“Mewujudkan Masyarakat Bahagia Dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan”

- Ekonomi kerakyatan menjadi dasar pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan umkm, dan optimalisasi potensi lokal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
- Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya jika didukung oleh seluruh elemen pembangunan, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menyusun langkah strategis dalam pembinaan dan pemberdayaan KUMKM.
- Sejalan dengan Misi ke-2 Pemerintah Provinsi, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”. Tujuan strategisnya adalah peningkatan PDRB sektor unggulan, termasuk sektor Koperasi dan UMKM. Untuk itu, diperlukan program unggulan dan inovatif yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.



12

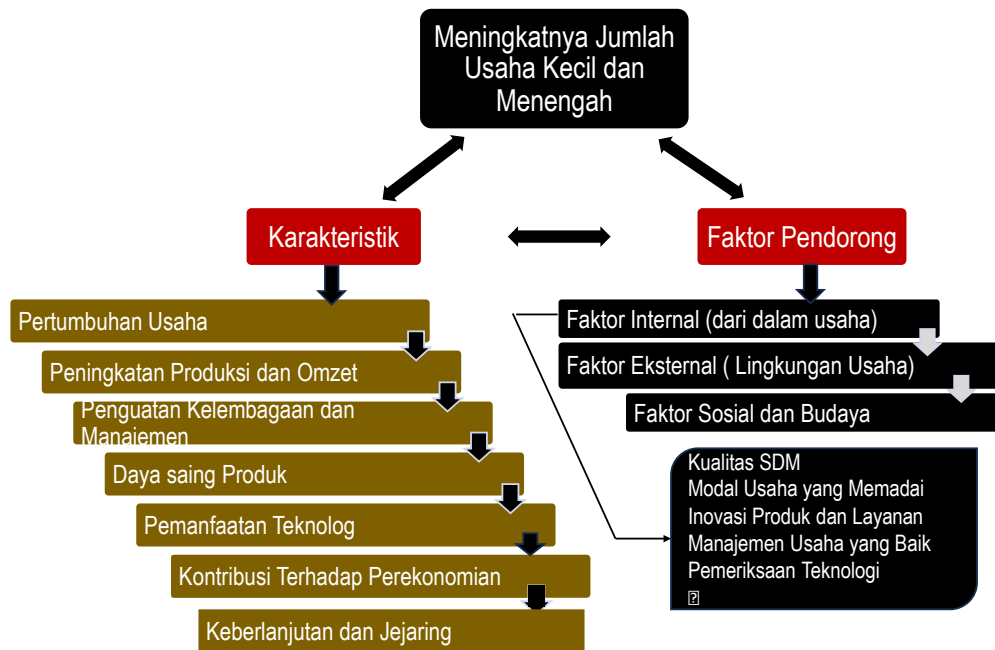
Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.2. Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Dalam Mendukung Pelaksanaan Misi Ke-2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Karena pada dasarnya, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bentuk ekonomi kerakyatan. Sebagaimana penjelasan misi kedua tersebut, ekonomi kerakyatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olehnya peningkatan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dalam perekonomian daerah menjadi sangat krusial dalam pembangunan daerah lima tahun mendatang. Untuk memperkuat peran strategis ini, diperlukan sinergi dan penguatan dari berbagai aspek yang saling terkait, antara lain peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah, peningkatan jumlah wirausaha, serta peningkatan kontribusi koperasi sektor produksi. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan membentuk ekosistem yang kondusif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan.

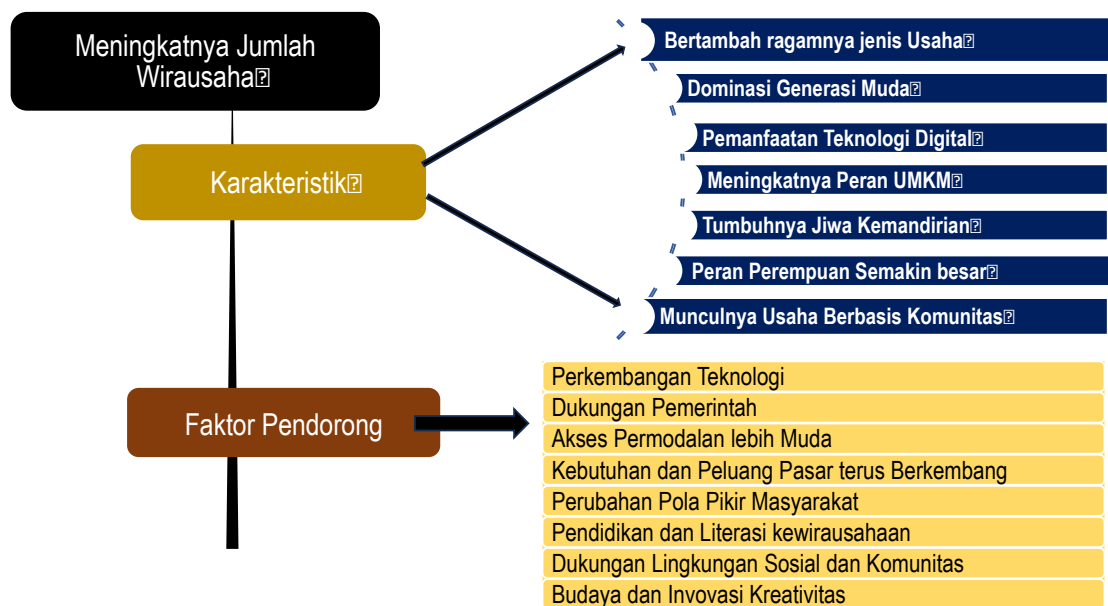
Dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan pertumbuhan aktor-aktor kunci di dalamnya, yaitu Usaha Kecil dan Menengah, Wirausaha, serta Koperasi itu sendiri. Peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah mencerminkan berkembangnya basis ekonomi lokal yang tersebar di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, pertanian, hingga jasa. Setiap penambahan Usaha Kecil dan Menengah secara langsung berkontribusi terhadap perluasan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin banyak Usaha Kecil dan Menengah yang tumbuh dan bertahan, semakin kuat pula pondasi ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan dan desentralisasi ekonomi. Usaha Kecil dan Menengah yang berdaya saing tidak hanya mampu bertahan dalam tekanan pasar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui peningkatan nilai tambah dan produksi lokal.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.3. Identifikasi Karakteristik Faktor Pendukung Peningkatan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

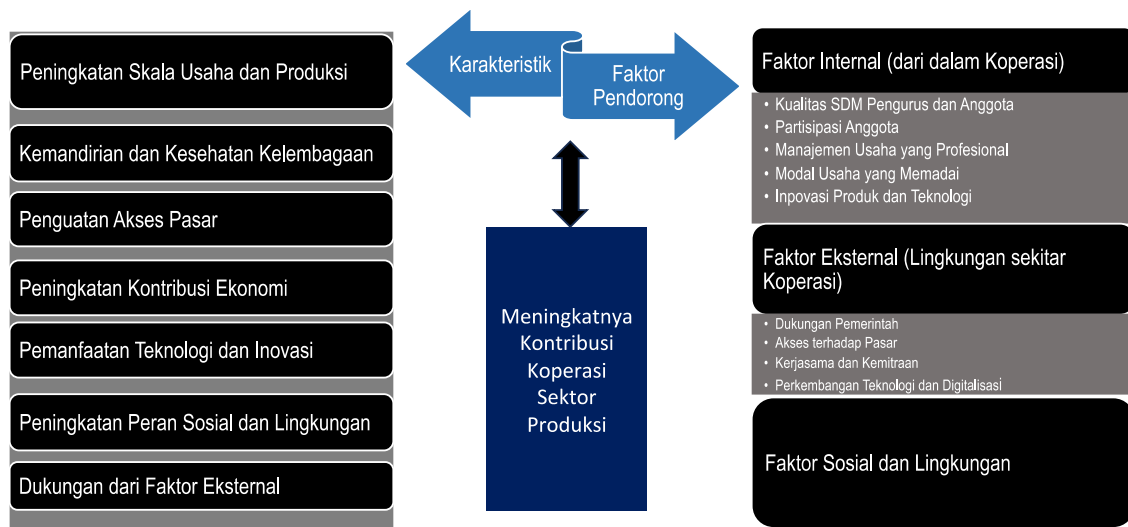
Peningkatan jumlah Wirausaha menjadi penggerak utama bagi lahirnya Usaha Kecil dan Menengah baru yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Wirausaha merupakan agen perubahan yang memainkan peran vital dalam menciptakan ide-ide bisnis baru, mengidentifikasi peluang pasar, serta mengambil risiko untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Pertumbuhan jumlah Wirausaha tidak hanya memperkaya ekosistem bisnis lokal, tetapi juga memunculkan efek pengganda terhadap penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, serta peningkatan mobilitas sosial ekonomi masyarakat. Di banyak daerah, keberhasilan peningkatan jumlah Wirausaha berkontribusi terhadap revitalisasi sektor informal menjadi sektor produktif, serta memperkuat struktur ekonomi berbasis inovasi dan kewirausahaan sosial. Dalam hal ini, wirausaha memainkan peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan peluang ekonomi, sekaligus sebagai pencetus transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.4. Identifikasi Karakteristik Faktor Pendukung Peningkatan Jumlah Wirausaha

Selanjutnya, peningkatan volume usaha Koperasi menandakan bahwa Koperasi sebagai entitas kolektif masyarakat tidak hanya bertumbuh dari sisi kelembagaan, tetapi juga mengalami ekspansi usaha yang signifikan. Volume usaha yang meningkat mencerminkan aktivitas ekonomi Koperasi yang makin besar, baik dari sisi pembiayaan, distribusi, produksi, maupun perdagangan. Koperasi yang tumbuh secara sehat dan produktif mampu memperluas akses pasar bagi anggotanya, menurunkan biaya transaksi, serta memperkuat posisi tawar pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai nilai ekonomi. Lebih dari itu, Koperasi berperan sebagai penghubung strategis antara Wirausaha dan Usaha Kecil dan Menengah dengan sumber daya produktif, seperti permodalan, pelatihan, teknologi, dan jaringan usaha. Dengan kapasitas usaha yang semakin besar, koperasi dapat menjadi platform pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi kelompok rentan, seperti petani kecil, nelayan, pedagang mikro, dan perempuan pelaku usaha.



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.5. Identifikasi Karakteristik Faktor Pendukung Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Ketiga elemen ini memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Peningkatan jumlah Wirausaha mendorong lahirnya Usaha Kecil dan Menengah baru, yang selanjutnya menjadi anggota Koperasi dan memperluas basis ekonomi Koperasi. Sebaliknya, Koperasi yang tumbuh mampu menyediakan dukungan sistemik bagi Usaha Kecil dan Menengah, serta Wirausaha untuk bertahan dan berkembang melalui layanan keuangan mikro, pelatihan manajerial, dan akses pasar. Dalam ekosistem ini, Koperasi menjadi katalisator kolektif yang mengonsolidasi daya ekonomi masyarakat dan mendorong efisiensi usaha. Ketika ketiga komponen tersebut bergerak secara sinergis dan terintegrasi, maka akan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Implikasinya terhadap perekonomian daerah sangat besar. Pertama, struktur ekonomi daerah akan menjadi lebih seimbang, tidak terpusat pada sektor formal berskala besar saja, tetapi menyebar secara merata dalam komunitas lokal. Kedua, peningkatan kontribusi sektor Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap PDRB akan memperluas basis penerimaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerataan ekonomi akan tercapai melalui peningkatan kapasitas usaha masyarakat kecil dan menengah yang selama ini menjadi kelompok marjinal. Keempat, melalui pemberdayaan ekonomi berbasis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, daerah memiliki instrumen yang efektif untuk menghadapi gejolak ekonomi nasional dan global, karena kekuatan ekonomi rakyat terbukti lebih resilien dalam situasi krisis. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah, pertumbuhan Wirausaha, dan penguatan Koperasi sebagai prioritas strategis tidak hanya akan mendorong peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

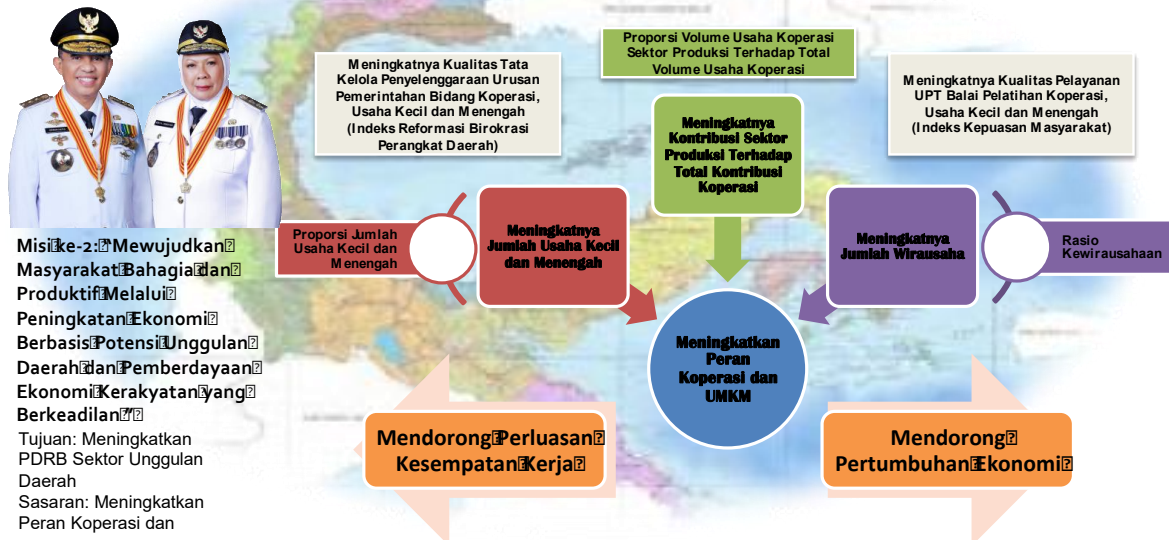
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketiga fokus strategis diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran strategis lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Lebih lanjut, untuk mendukung pelaksanaan misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ditetapkan

tujuan “Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis, yakni: 1) Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah; 2) Meningkatnya Jumlah Wirausaha; dan 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Produksi Terhadap Total Kontribusi Koperasi. Karena ketiga sasaran strategis ini menjadi prasyarat utama bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan ekosistem Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kuat, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan beberapa indikator kinerja yang menjadi alat ukur pelaksanaan sasaran strategis tersebut. *Pertama*, sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah” akan diukur melalui indikator kinerja “Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah”. *Kedua*, sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Wirausaha” akan diukur melalui indikator kinerja “Rasio Kewirausahaan”. *Ketiga*, sasaran strategis “Meningkatnya Kontribusi Sektor Produksi Terhadap Total Kontribusi Koperasi” akan diukur melalui indikator kinerja “Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi”.

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045:
“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 Terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah mengacu pada visi dan misi yang telah dijabarkan melalui tujuan dan sasaran kepala daerah terpilih. Untuk itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Gubernur/Wakil Gubernur terpilih yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kinerja tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,65	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	
		Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	2,70	2,78	2,87	2,96	3,06	3,12	
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Rasio Kewirausahaan	3,21	3,28	3,34	3,42	3,50	3,62	
		Meningkatnya Kontribusi Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Kontribusi Koperasi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi	66,42	67,08	68,50	69,72	70,11	71,61	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka perlu dirumuskan gagasan-gagasan atau inovasi yang diharapkan menjadi program unggulan Perangkat Daerah. Program unggulan ini yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun mendatang. Ide besar dari inovasi ini adalah peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peningkatan daya saing tersebut dapat memperkuat peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian daerah. Pentingnya penguatan peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian daerah diharapkan memberikan dampak dalam mensejahterahkan masyarakat Sulawesi Tengah. Inovasi tersebut masuk dalam 9 (sembilan) program prioritas daerah yakni program “**SULTENG BERANI**” yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029, yakni:

1. Pada Program “**Berani Sejahtera**” akan didukung oleh beberapa gagasan dan inovasi program unggulan, yakni: *Pertama*, Program Inovasi “Berani Terampil” berupa pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Daerah/Lokal, dan pelaksanaan Pelatihan Perkoperasian, Manajerial, Keterampilan Teknis bagi Pengurus/Pengelola dan Anggota Koperasi Syariah; *Kedua*, Program Inovasi “Berani Naik Kelas” berupa peningkatan produk-produk UMKM dari segi kualitas maupun daya saing melalui dukungan terhadap pembiayaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk. Standarisasi dan sertifikasi produk sangat penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan skala usahanya. Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi produk Koperasi dan UMKM dilakukan melalui fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan: izin edar BPOM MD; sertifikat halal; Nutrition Facts; sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Ketiga*, Program Inovasi Pemanfaatan Pemasaran Melalui Platform Digital Lokal (*Marketplace Banuatopobalu*). Pemanfaatan platform digital sangat berperan dalam meningkatkan efektifitas pemasaran produk UMKM. Pemanfaatan konsep pemasaran

berbasis teknologi digital menjadi harapan bagi UMKM untuk berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi. Pemanfaatan platform digital dilakukan dengan cara: mendorong UMKM untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) dalam marketplace; dan mendorong produk UMKM dalam e-katalog/toko daring;

2. Pada Program “**Berani Harmoni**” akan didukung oleh beberapa gagasan dan inovasi program unggulan, yakni: *Pertama*, Program Inovasi “Berani Wirausaha Baru” berupa pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan, Manajerial, Keterampilan Teknis bagi tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendidikan dan Pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan para tamatan SMA/SMK tersebut; *Kedua*, Program Inovasi “Berani Akses Pembiayaan” berupa pelaksanaan fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitasi tersebut dengan memberikan subsidi bunga kepada pelaku usaha sebesar 6 persen yang diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam pengembalian pinjaman. Fasilitasi pembiayaan tersebut dapat memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fasilitasi pembiayaan maka perlu mengangkat Tenaga Pendamping KUR di setiap Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah; *Ketiga*, Program Inovasi Inkubasi Bisnis berupa pelaksanaan inkubasi bagi para pelaku usaha. Inkubasi bisnis merupakan proses pembinaan dan pendampingan usaha bagi para pelaku usaha dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan bisnis tersebut;
3. Pada Program “**Berani Makmur**” akan didukung oleh gagasan dan inovasi program unggulan, yakni Program Inovasi “Berani Berkoperasi” berupa pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi yang ada di Sulawesi Tengah. Selain itu akan dilaksanakan Penumbuhan

Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya yang menyasar pada masyarakat. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendampingan dan Pembinaan Koperasi, maka perlu mengangkat Tenaga Pendamping Koperasi disetiap Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah.

“ SULTENG BERANI ”

1. “BERANI SEJAHTERA”

Fokus pada pemberdayaan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan koperasi (Berani Terampil), peningkatan daya saing produk melalui standarisasi dan sertifikasi (Berani Naik Kelas), serta pemasaran digital lewat marketplace lokal (Pemanfaatan Platform Digital).

2. “BERANI HARMONI”

Mendorong kewirausahaan bagi lulusan SMA/SMK (Berani Wirausaha Baru), mempermudah akses pembiayaan lewat KUR (Akses Pembiayaan), dan mempercepat pertumbuhan bisnis lewat program Inkubasi Bisnis.

3. “BERANI MAKMUR”

Memperkuat koperasi melalui peningkatan produktivitas, akses pasar dan pembiayaan, serta pembinaan manajemen dan kelembagaan (Berani Berkoperasi).



3

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 3.7. Program Prioritas “Sulteng Berani” Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unit organisasi teknis yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan menghadapi berbagai hambatan ataupun permasalahan. Untuk mengatasinya, maka diperlukan ide-ide ataupun gagasan yang kemudian dapat dijadikan inovasi dalam mendukung pelayanan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Sulawesi Tengah. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Agar penerapan atas inovasi-inovasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program “**SULTENG BERANI**”, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah harus berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan pengendalian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara khusus, dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Gubernur dan Bupati/Walikota bertugas untuk menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kolaborasi antar Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Salah satu bentuk kolaborasi antara Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah dalam penerapan inovasi-inovasi yang telah dijelaskan di atas. Pada Program “**Berani Sejahtera**” khususnya Program Inovasi “Berani Naik Kelas” maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian pada Program Inovasi Pemanfaatan Pemasaran Melalui Platform Digital Lokal (*Marketplace Banuatopobalu*), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong UMKM yang menjadi binaannya untuk mendaftarkan produk usahanya pada *Marketplace Banuatopobalu*.

Pada Program “**Berani Harmoni**” khususnya Program Inovasi “Berani Wirausaha Baru” Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong penciptaan wirausaha baru yang menyasar pada tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, pada Program Inovasi Inkubasi Bisnis, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong UMKM yang menjadi binaannya untuk mengikuti inkubasi bagi para pelaku usaha.

Penerapan keenam inovasi pada Program “**Berani Sejahtera**” dan Program “**Berani Harmoni**” serta dukungan kolaborasi yang kuat antar seluruh Perangkat Daerah terkait dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau yang dikenal dengan konsep **UMKM “Bahagia”**. Konsep **UMKM “Bahagia”** adalah pendekatan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi dan pertumbuhan semata, tetapi juga memastikan pelaku usaha merasakan keberlanjutan, kenyamanan, dan keberdayaan dalam menjalankan usahanya. Konsep **UMKM “Bahagia”** menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada pusat perhatian pembangunan, tidak sekadar sebagai objek kebijakan ekonomi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas kepastian, keberdayaan, dan kesejahteraan dalam setiap aspek usahanya. UMKM dianggap “bahagia” apabila mereka memiliki akses yang mudah terhadap pembiayaan, kepastian hukum, pendampingan yang berkelanjutan,

kemudahan pemasaran produk, serta mendapat dukungan lingkungan usaha yang kolaboratif dan inklusif.

Kemudian pada Program **“Berani Makmur”** yang didukung oleh gagasan dan inovasi program unggulan, yakni Program Inovasi “Berani Berkoperasi”, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Kolaborasi ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha bagi Koperasi yang ada di Sulawesi Tengah.

“ SASARAN INOVASI”



4

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

**Gambar 3.8. Sasaran Inovasi Program Prioritas “Sulteng Berani”
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029**

Program Inovasi “Berani Berkoperasi” ini sangat relevan dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah Pusat, yakni pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perlu diketahui bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka diharapkan kepada seluruh institusi pemerintahan terkait untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada Instruksi Presiden tersebut, secara khusus para Gubernur diperintahkan untuk: a) mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b) mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; c) menyelaraskan serta menyantumkan program kegiatan dan sub kegiatan

yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah; d) menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; e) melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing akan melakukan fasilitasi dalam pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah. Fasilitasi dimaksud berupa pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada proses dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah. Sebagai langkah awal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Perangkat Daerah terkait terkait pembahasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah. Kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan penetapan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah kepada seluruh Bupati/Walikota terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan adanya program inovasi “Berani Berkoperasi” maka diharapkan dapat menjadi daya ungkit dalam menunjang keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah.

Secara garis besar, ketujuh inovasi yang telah dibahas sebelumnya, diperkirakan mampu untuk menjawab kebutuhan dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah. Inovasi-inovasi tersebut dapat meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan pada akhirnya memberikan dampak dalam

penguatan peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Inovasi tersebut akan berkontribusi dalam pencapaian Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2025-2029.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Di sebagian besar provinsi di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyumbang lebih dari 90 persen jumlah unit usaha dan menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Selain itu, koperasi sebagai entitas usaha berbasis anggota memiliki potensi besar dalam mengelola sumber daya lokal secara kolektif dan demokratis, sehingga dapat memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, penguatan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan langkah krusial dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah dan mempercepat transformasi struktural perekonomian yang lebih merata.

Namun demikian, berbagai tantangan masih membatasi optimalisasi peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi dan teknologi, serta lemahnya daya saing produk menjadi hambatan utama. Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum memiliki legalitas dan belum memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, sedangkan koperasi masih menghadapi persoalan kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan. Di sisi lain, keterbatasan akses pasar, terutama pasar digital dan global, semakin menurunkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal yang belum mampu beradaptasi

dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen. Belum optimalnya integrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke dalam rantai pasok industri dan lemahnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan juga memperlemah posisi tawar mereka dalam perekonomian.

Peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang terencana, sistematis, dan bertahap agar kebijakan dan program yang dirancang dapat tepat sasaran, terukur, serta berkelanjutan. Perlunya penatahapan fokus pelaksanaan didasarkan pada kenyataan bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki karakteristik yang sangat beragam dari segi skala usaha, kapasitas sumber daya manusia, tingkat digitalisasi, akses pembiayaan, hingga kemampuan inovasi. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah dan daya dukung kelembagaan pemerintah juga tidak seragam, sehingga pelaksanaan program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus disesuaikan dengan konteks lokal, tingkat kesiapan pelaku, dan efektivitas intervensi pada tiap jenjang waktu. Penatahapan juga diperlukan untuk menghindari pendekatan yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) yang justru dapat menimbulkan ketimpangan baru atau membebani Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum siap bertransformasi. Secara bertahap fokus peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah sebagai tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
**Penahapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026-2030**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pemetaan Kebutuhan dan Penguatan Kapasitas Dasar	Pendampingan, Fasilitasi Pembiayaan, dan Inkubasi Usaha	Digitalisasi, Inklusi, dan Penguatan Jejaring Kemitraan	Monitoring, Akselerasi Bisnis, dan Penguatan Kebijakan	Keberlanjutan Program, Evaluasi Dampak, dan Perencanaan Jangka Panjang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Secara spesifik, tahapan fokus Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama (Tahun 2026), prioritas utama adalah melakukan pemetaan menyeluruh terkait kebutuhan pelatihan, kendala akses sumber daya, serta potensi wirausaha dan koperasi sektor produksi di wilayah provinsi. Langkah ini dilakukan melalui survei, konsultasi dengan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil pemetaan, dirancang program pelatihan dasar kewirausahaan dan manajemen usaha yang tepat sasaran untuk meningkatkan kompetensi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, dilakukan penguatan sistem informasi dan basis data yang memudahkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengakses informasi sumber daya produktif seperti modal, teknologi, bahan baku, dan pasar. Pendekatan ini bertujuan membangun fondasi yang kokoh untuk program pengembangan yang lebih lanjut;
2. Pada tahun kedua (Tahun 2027) difokuskan pada pelaksanaan pelatihan lanjutan yang lebih teknis dan spesifik, serta pendampingan langsung agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu menerapkan ilmu dan meningkatkan produktivitas usaha. Selain

peningkatan kapasitas, difasilitasi pula akses pembiayaan melalui kolaborasi dengan bank, lembaga keuangan mikro, dan program pembiayaan pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendirian dan pengembangan program inkubasi usaha menjadi prioritas untuk mendukung pengusaha baru dan koperasi di sektor produksi, dengan memberikan pendampingan intensif dalam hal manajemen, teknologi produksi, dan pemasaran. Sosialisasi kewirausahaan secara masif dilakukan di tingkat sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas untuk menumbuhkan minat dan jumlah wirausaha baru;

3. Pada tahun ketiga (Tahun 2028), pengembangan platform digital menjadi fokus utama untuk memperluas akses pasar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta mempermudah pelatihan online dan pendampingan jarak jauh. Program inklusi khusus diarahkan untuk mengakomodasi wirausaha muda dan perempuan agar memiliki peluang yang sama dalam memperoleh sumber daya produktif dan akses pasar. Penguatan jejaring kemitraan strategis antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi difokuskan untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan usaha. Selain itu, difokuskan pula pada adopsi teknologi tepat guna dan inovasi di koperasi sektor produksi guna meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk, sehingga koperasi mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif;
4. Pada tahun keempat (Tahun 2029), dilakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap capaian pelatihan, akses pembiayaan, dan kemitraan yang telah dilaksanakan selama tiga tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, dikembangkan program akselerasi bisnis yang menyasar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan potensi tinggi agar dapat naik kelas menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemerintah provinsi juga akan memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, perlindungan hak Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, serta insentif bagi sektor produksi. Optimalisasi pemasaran berbasis komunitas, koperasi, dan digital akan ditingkatkan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal;

5. Pada tahun kelima (Tahun 2030) menitikberatkan pada penguatan mekanisme keberlanjutan program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi yang telah berjalan agar dapat terus berjalan tanpa ketergantungan pada intervensi pemerintah secara langsung. Dilakukan evaluasi mendalam untuk mengukur dampak nyata terhadap peningkatan jumlah wirausaha, daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan kontribusi koperasi sektor produksi terhadap perekonomian daerah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan replikasi program sukses di wilayah lain. Penguatan jejaring komunitas wirausaha dan koperasi serta peningkatan kolaborasi dengan jaringan nasional dan internasional akan terus dilakukan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diharapkan dapat naik kelas dan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Transformasi Koperasi menjadi lebih sehat, aktif, dan modern, serta peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tangguh dan inovatif akan berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, peningkatan peran sektor ini akan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas peluang kerja, serta menciptakan ekosistem usaha yang adaptif terhadap perubahan global dan berbasis potensi lokal.

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Strategi dan kebijakan

jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3.3.
Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1.		Revitalisasi koperasi sektor riil, digitalisasi koperasi, dan penguatan kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal	Meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan tata kelola koperasi berbasis prinsip koperasi modern	
			Memfasilitasi sertifikasi pengurus dan manajer koperasi produksi	
			Mendorong perbaikan sistem pelaporan dan transparansi keuangan	
			Memberikan pendampingan hukum dan teknis untuk koperasi dalam proses	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			legalitas dan restrukturisasi organisasi	
			Mengembangkan koperasi produksi yang berbasis komoditas unggulan lokal (misalnya: kopi, rumput laut, tenun, peternakan rakyat)	
			Mendorong pembentukan koperasi sekunder untuk integrasi kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran	
			Memberikan dukungan teknis dalam perencanaan bisnis dan feasibility study koperasi produksi	
			Menyediakan bantuan sarana dan prasarana produksi secara selektif dan berbasis kebutuhan	
			Meningkatkan kapasitas koperasi dalam menyusun proposal usaha dan business plan untuk pembiayaan KUR dan LPDB-KUMKM	
			Membangun kolaborasi dengan perbankan, fintech, dan investor lokal sebagai mitra koperasi	
			Memberikan insentif fiskal atau skema pembiayaan lunak untuk koperasi yang bergerak di sektor hilirisasi produk lokal	
			Mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi keuangan dan memanfaatkan teknologi dalam manajemen pembiayaan	
			Mendorong koperasi untuk memanfaatkan	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			sistem informasi manajemen berbasis digital	
			Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemasaran digital (marketplace, media sosial, website)	
			Membangun ekosistem koperasi digital di sektor produksi yang menghubungkan produksi, logistik, dan pemasaran secara daring	
			Menghubungkan koperasi dengan platform e-katalog daerah atau nasional agar dapat mengakses pasar pemerintah	
			Meningkatkan akses anggota terhadap pelatihan teknis produksi dan literasi keuangan	
			Mengintegrasikan koperasi dengan program pemberdayaan masyarakat desa dan program pengentasan kemiskinan	
			Mendorong koperasi sebagai mitra dalam pelaksanaan program CSR, padat karya, dan program perlindungan sosial	
			Menjadikan koperasi sebagai pusat kolaborasi antar-pelaku ekonomi lokal seperti BUMDes, kelompok tani, dan wirausaha muda	
			Melakukan identifikasi dan pemetaan koperasi produksi yang tidak aktif, stagnan, atau bermasalah	
			Menyediakan skema revitalisasi kelembagaan dan usaha, termasuk	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			pembinaan SDM dan fasilitasi modal kerja	
			Mendorong merger koperasi kecil ke dalam koperasi sekunder yang lebih efisien dan berkelanjutan	
			Memfasilitasi reorientasi usaha koperasi lama ke sektor yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini	
2.		Pengembangan program pelatihan berbasis keterampilan teknis dan wirausaha	Menyusun regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha bagi wirausaha baru	
			Melakukan kampanye budaya wirausaha melalui seminar, talkshow, dan festival kewirausahaan	
			Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bisnis, manajemen usaha, dan literasi digital	
			Menyediakan program inkubasi bisnis, mentorship, dan coaching untuk wirausaha pemula	
			Mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan ke dalam pendidikan formal dan vokasi	
			Fasilitasi akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir daerah	
			Membangun kemitraan dengan bank, fintech, dan lembaga penjamin kredit untuk mendukung modal awal	
			Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan agar wirausaha mampu mengelola modal	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			dengan baik	
			Membantu wirausaha baru memasarkan produk melalui e-commerce dan marketplace lokal/nasional	
			Menjalin kemitraan dengan koperasi, UKM mapan, serta perusahaan besar sebagai offtaker	
			Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dagang, expo, dan event promosi daerah	
			Memberikan pelatihan digitalisasi usaha, termasuk e-marketing dan penggunaan aplikasi manajemen keuangan	
			Mendorong lahirnya start-up teknologi lokal melalui inkubator berbasis kampus atau komunitas	
			Mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) sebagai pusat informasi, pelatihan, dan konsultasi bisnis	
			Memfasilitasi pembentukan komunitas wirausaha muda, perempuan, dan wirausaha sosial	
			Meningkatkan sinergi multipihak (pemerintah, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, komunitas, media) dalam mendukung ekosistem kewirausahaan	
			Mengidentifikasi sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, dsb.) sebagai basis penciptaan wirausaha	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			Memberdayakan masyarakat desa melalui program wirausaha perdesaan berbasis BUMDes atau koperasi	
3.		Penguatan ekosistem bisnis berbasis ekonomi sirkular	Penyederhanaan prosedur perizinan usaha melalui OSS berbasis risiko dan aplikasi daerah	
			Peningkatan perlindungan hukum dan kepastian usaha bagi pelaku UKM	
			Penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha, literasi digital, dan kewirausahaan secara rutin	
			Pendampingan teknis berkelanjutan untuk peningkatan kualitas produk dan inovasi	
			Memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
			Mengembangkan platform pembiayaan alternatif, seperti fintech P2P lending dan crowdfunding	
			Fasilitasi UKM untuk masuk ke e-commerce nasional dan global	
			Membuka ruang partisipasi UKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (e-katalog lokal)	
			Membangun kemitraan antara UKM dengan perusahaan besar/BUMN untuk memperkuat rantai pasok	
			Pengembangan program digitalisasi UKM, termasuk pelatihan pemasaran digital dan aplikasi keuangan	
			Pengembangan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
			platform data dan sistem informasi UKM untuk mendukung pengambilan kebijakan	
			Identifikasi sektor unggulan daerah sebagai basis pengembangan UKM	
			Penguatan konektivitas antar-klaster untuk memperbesar daya saing regional dan nasional	
			Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta	
			Mendorong terbentuknya asosiasi/komunitas UKM yang aktif sebagai sarana advokasi dan jejaring usaha	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dengan target kinerja hasil (*outcome*) yang akan ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan juga selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UKM	Penyederhanaan prosedur perizinan usaha melalui OSS berbasis risiko dan aplikasi daerah
			Peningkatan perlindungan hukum dan kepastian usaha bagi pelaku UKM
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM UKM	Penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha, literasi digital, dan kewirausahaan secara rutin
			Pendampingan teknis berkelanjutan untuk peningkatan kualitas produk dan inovasi
		Peningkatan Akses Pembiayaan dan Permodalan	Memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
			Mengembangkan platform pembiayaan alternatif, seperti fintech P2P lending dan crowdfunding
		Penguatan Akses Pasar dan Jaringan Usaha	Fasilitasi UKM untuk masuk ke e-commerce nasional dan global
			Membuka ruang partisipasi UKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (e-katalog lokal)
			Membangun kemitraan antara UKM dengan perusahaan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			besar/BUMN untuk memperkuat rantai pasok
		Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	Pengembangan program digitalisasi UKM, termasuk pelatihan pemasaran digital dan aplikasi keuangan
			Pengembangan platform data dan sistem informasi UKM untuk mendukung pengambilan kebijakan
		Pengembangan Klaster dan Sentra UKM Berbasis Potensi Daerah	Identifikasi sektor unggulan daerah sebagai basis pengembangan UKM
			Penguatan konektivitas antar-klaster untuk memperbesar daya saing regional dan nasional
		Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Multipihak	Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta
			Mendorong terbentuknya asosiasi/komunitas UKM yang aktif sebagai sarana advokasi dan jejaring usaha
	Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Penciptaan Iklim Kewirausahaan yang Kondusif	Menyusun regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha bagi wirausaha baru
			Melakukan kampanye budaya wirausaha melalui seminar, talkshow,



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan festival kewirausahaan
		Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Calon Wirausaha	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bisnis, manajemen usaha, dan literasi digital
			Menyediakan program inkubasi bisnis, mentorship, dan coaching untuk wirausaha pemula
			Mengintegrasikan kurikulum kewirausahaan ke dalam pendidikan formal dan vokasi
		Peningkatan Akses Pembiayaan untuk Wirausaha Baru	Fasilitasi akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir daerah
			Membangun kemitraan dengan bank, fintech, dan lembaga penjamin kredit untuk mendukung modal awal
			Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan agar wirausaha mampu mengelola modal dengan baik
		Penguatan Akses Pasar dan Jaringan Bisnis bagi Wirausaha	Membantu wirausaha baru memasarkan produk melalui e-commerce dan marketplace lokal/nasional
			Menjalin kemitraan dengan koperasi, UKM mapan, serta perusahaan besar sebagai offtaker
			Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dagang, expo, dan event promosi daerah



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi untuk Wirausaha Baru	Memberikan pelatihan digitalisasi usaha, termasuk e-marketing dan penggunaan aplikasi manajemen keuangan
			Mendorong lahirnya start-up teknologi lokal melalui inkubator berbasis kampus atau komunitas
		Pengembangan Ekosistem dan Jejaring Kewirausahaan Daerah	Mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) sebagai pusat informasi, pelatihan, dan konsultasi bisnis
			Memfasilitasi pembentukan komunitas wirausaha muda, perempuan, dan wirausaha sosial
			Meningkatkan sinergi multipihak (pemerintah, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, komunitas, media) dalam mendukung ekosistem kewirausahaan
		Pemberdayaan Wirausaha Berbasis Potensi Daerah	Mengidentifikasi sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, dsb.) sebagai basis penciptaan wirausaha
			Memberdayakan masyarakat desa melalui program wirausaha perdesaan berbasis BUMDes atau koperasi



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kontribusi Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Kontribusi Koperasi	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi Produksi	Meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan tata kelola koperasi berbasis prinsip koperasi modern
			Memfasilitasi sertifikasi pengurus dan manajer koperasi produksi
			Mendorong perbaikan sistem pelaporan dan transparansi keuangan
			Memberikan pendampingan hukum dan teknis untuk koperasi dalam proses legalitas dan restrukturisasi organisasi
		Pengembangan Usaha Produktif Koperasi Berbasis Klaster dan Potensi Daerah	Mengembangkan koperasi produksi yang berbasis komoditas unggulan lokal (misalnya: kopi, rumput laut, tenun, peternakan rakyat)
			Mendorong pembentukan koperasi sekunder untuk integrasi kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran
			Memberikan dukungan teknis dalam perencanaan bisnis dan feasibility study koperasi produksi
			Menyediakan bantuan sarana dan prasarana produksi secara selektif dan berbasis kebutuhan
		Peningkatan Akses	Meningkatkan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Koperasi terhadap Pembiayaan dan Investasi Produktif	kapasitas koperasi dalam menyusun proposal usaha dan business plan untuk pembiayaan KUR dan LPDB-KUMKM
			Membangun kolaborasi dengan perbankan, fintech, dan investor lokal sebagai mitra koperasi
			Memberikan insentif fiskal atau skema pembiayaan lunak untuk koperasi yang bergerak di sektor hilirisasi produk lokal
			Mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi keuangan dan memanfaatkan teknologi dalam manajemen pembiayaan
		Digitalisasi dan Inovasi Usaha Koperasi Produksi	Mendorong koperasi untuk memanfaatkan sistem informasi manajemen berbasis digital
			Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemasaran digital (marketplace, media sosial, website)
			Membangun ekosistem koperasi digital di sektor produksi yang menghubungkan produksi, logistik, dan pemasaran secara daring
			Menghubungkan koperasi dengan platform e-katalog daerah atau nasional



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			agar dapat mengakses pasar pemerintah
		Penguatan Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Anggota dan Komunitas	Meningkatkan akses anggota terhadap pelatihan teknis produksi dan literasi keuangan
			Mengintegrasikan koperasi dengan program pemberdayaan masyarakat desa dan program pengentasan kemiskinan
			Mendorong koperasi sebagai mitra dalam pelaksanaan program CSR, padat karya, dan program perlindungan sosial
			Menjadikan koperasi sebagai pusat kolaborasi antar-pelaku ekonomi lokal seperti BUMDes, kelompok tani, dan wirausaha muda
		Revitalisasi dan Reorientasi Koperasi Produksi Tidak Aktif atau Tidak Sehat	Melakukan identifikasi dan pemetaan koperasi produksi yang tidak aktif, stagnan, atau bermasalah
			Menyediakan skema revitalisasi kelembagaan dan usaha, termasuk pembinaan SDM dan fasilitasi modal kerja
			Mendorong merger koperasi kecil ke dalam koperasi sekunder yang lebih efisien dan berkelanjutan
			Memfasilitasi reorientasi usaha



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi	<i>Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029</i>		
Misi	Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			koperasi lama ke sektor yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

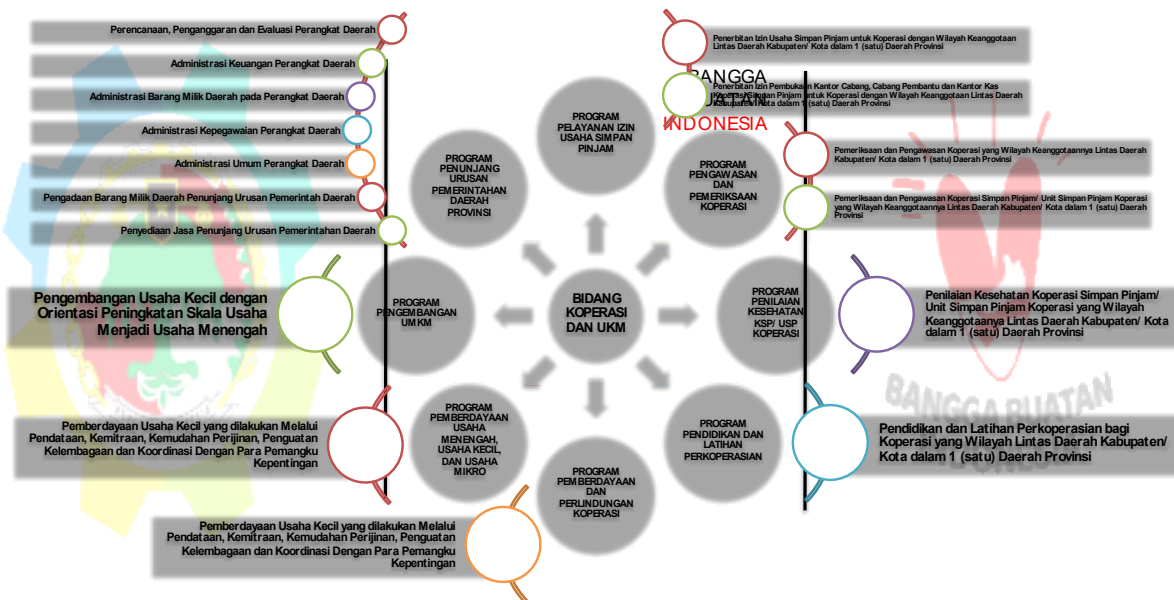
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah.

Rincian Program dan Kegiatan U rusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

Gambar 4.1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dengan uraian lengkap mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pagu pendanaan indikatif yang diproyeksikan mulai tahun 2025-2029 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1.
**Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Meningkatkan Peran Koperasi					Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		
	Meningkatkan Peran Koperasi				Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB		
		Meningkatkan Kontribusi Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Kontribusi Koperasi			Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sekretariat



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja		Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja		Nilai Kematangan Statistik Sektorial Pada Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat
				Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen	Kepmenda gri Nomor



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **Provinsi Sulawesi Tengah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	900.1.15.5-3406
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaria t
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaria t
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi Keuangan SKPD	Keuangan SKPD	-3406
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretaria t
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	pada SKPD	-3406
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Nilai Hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kepegawaian	Kepegawaian		
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
			Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Penerapan SPBE Pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaria t
			Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaria t
			Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan		Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaria t



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zona Integritas (ZI)		Zona Integritas (ZI)		
			Meningkatnya Penerapan SP4N Lapor Perangkat Daerah		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat
			Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
			Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah		Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaria t



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan		Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretaria t



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Publik Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat
			Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik		Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Sekretariat



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Daerah			Urusan Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Ketersediaan Aset Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dalam Kondisi Baik		Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Diberikan Layanan Perizinan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Usulan Tambahan
			Meningkatnya Kualitas Fasilitas Perizinan Usaha Simpan Pinjam		Persentase Kualitas Fasilitas Perizinan Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam		Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terfasilitasinya Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-3406
			Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat		Persentase Koperasi Sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Usulan Tambahan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi		Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi yang Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi yang Terlatih		Persentase Kualitas SDM Koperasi yang Terlatih	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi		Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi yang Berkualitas	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pemanfaatan Modul Dalam Pendidikan dan Latihan Koperasi		Persentase Penyediaan Modul Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Produktivitas		Persentase Meningkatnya	Program Pemberdayaan dan	Inmendagri Nomor 2



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Koperasi		Koperasi Berkualitas	Perlindungan Koperasi	Tahun 2025
			Meningkatnya Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Usulan Tambahan
			Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Fasilitasi Kemitraan Antar Koperasi Maupun Antara Koperasi Dengan Badan Hukum Lainnya Termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah Provinsi			
				Fasilitasi Pelaporan Status Kelembagaan dan/atau Perkembangan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Melalui Aspek Kelembagaan, Produksi, Pemasaran, Keuangan, dan Inovasi Teknologi bagi Koperasi dengan	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah		
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Akses UMKM Terhadap Sumber Daya Produktif		Pertumbuhan Pelaku Usaha Hasil Pendampingan yang Memiliki Kemampuan Mengakses Sumber Daya Produktif Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Usulan Tambahan
			Meningkatnya Kualitas SDM UMKM yang Terlatih		Persentase Kualitas SDM UMKM yang Terlatih	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Usulan Tambahan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Fasilitas Perizinan Usaha Bagi Pelaku Usaha		Persentase Fasilitas Perizinan Usaha Bagi Pelaku Usaha	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan UMKM		Persentase Cakupan Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pelatihan UMKM		Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan UMKM yang Berkualitas	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Meningkatnya Pemanfaatan Modul Dalam Pendidikan dan Latihan UMKM		Persentase Penyediaan Modul Pelatihan UMKM dan Kewirausahaan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kemiskinan			
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil yang Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
			Meningkatnya Daya Saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas		Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Program Pengembangan UMKM	Usulan Tambahan
			Meningkatnya Fasilitasi Kemitraan dan		Persentase UMKM yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan dan	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pembiayaan		Pembiayaan	Usaha Menjadi Usaha Menengah	
			Meningkatnya Cakupan Pengembangan UMKM		Persentase Cakupan Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406
				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Melalui	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5-3406



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/atau Kegiatan Lainnya			
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
		Meningkatn ya Jumlah Wirausaha			Rasio Kewirausahaan		
			Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha		Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Inmendagr i Nomor 2 Tahun 2025
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Wirausaha		Persentase Wirausaha Yang Diberikan Fasilitasi Pelatihan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406
			Meningkatnya Jumlah Wirausaha		Persentase Wirausaha Baru	Program Pengembangan UMKM	Usulan Tambahan
			Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kepada Calon Wirausaha		Persentase Calon Wirausaha Yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kepmenda gri Nomor 900.1.15.5 -3406

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

**Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026-2030**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah													
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				15.358.52 1.756,00		16.274.43 4.047,90		17.221.50 3.525,71		18.255.66 9.027,33		19.388.28 0.632,51	
Meningkatny a Kualitas Tata Kelola	Indeks Reformasi Birokrasi	58.7 1	67. 91	15.358.52 1.756,00	72. 11	16.274.43 4.047,90	76. 86	17.221.50 3.525,71	81. 46	18.255.66 9.027,33	86. 41	19.388.28 0.632,51	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah												
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				294.840.0 00		419.778.6 44		446.460.7 41,71		493.742.5 13		533.772.6 19	
Meningkatny a Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,0 6	86	294.840.0 00	86	419.778.6 44	86	446.460.7 41,71	86	493.742.5 13	86	533.772.6 19	
	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah (%)	-	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		
	Nilai Kematangan Statistik Sektoral Pada	-	2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perangkat Daerah (Nilai)												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5	72.580.000	5	76.651.013	5	92.444.598	5	101.720.594	5	112.400.635	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	44.800.000	1	30.718.852	1	36.317.872	1	39.606.327	1	43.392.533	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	40.250.000	1	27.320.525	1	32.300.144	1	35.224.807	1	38.592.158	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	17.750.000	2	22.874.674	2	15.221.297	2	16.599.532	2	18.186.381	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	17.750.000	1	23.614.006	1	16.095.385	1	17.552.765	1	19.230.739	
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	1	9	19.000.000	9	19.477.348	9	23.027.418	9	25.112.469	9	27.513.120	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	8	60.210.000	8	114.122.22 6	8	138.568.22 7	8	152.926.01 9	8	169.457.05 3	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan		10	7.500.000	20	30.000.000	30	30.000.000	40	30.000.000	50	30.000.000	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)												
Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	7.500.000	1	40.000.000	1	33.742.999 ,71	1	40.000.000	1	40.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD (Dokumen)		11	7.500.000	11	35.000.000	11	28.742.801	11	35.000.000	11	35.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.802.81 5.509		13.259.03 7.634		13.743.26 9.026		14.243.05 6.700		14.763.38 6.815	
Meningkatny a Kualitas	Persentase Hasil	100	10 0	12.802.81 5.509	10 0	13.259.03 7.634	10 0	13.743.26 9.026	10 0	14.243.05 6.700	10 0	14.763.38 6.815	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tindaklanj ut Rekomendas i (TLHP) BPK dan APIP (%) Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah (%)	93	99		99		99		99		99		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	67	102	11.437.696 .609	102	11.895.203 .778	102	12.371.011 .929	102	12.865.852 .406	102	13.380.486 .502	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4	1.314.570. 000	4	1.307.620. 000	4	1.307.620. 000	4	1.307.620. 000	4	1.307.620. 000	
Pelaksanaan Penatausahaa	Jumlah Dokumen	1	4	12.048.900	4	12.195.414	4	14.418.230	4	15.723.750	4	17.226.877	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)												
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	30.250.00	1	30.617.838	1	36.198.447	1	39.476.089	1	43.249.844	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Laporan)												
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	2	8.250.000	2	13.400.604	2	14.020.420	2	14.384.455	2	14.803.592	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)												



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.850.00 0		58.238.77 1		68.853.75 4		75.088.21 7		82.266.35 0	
Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan (%)	-	10 0	30.850.00 0	10 0	58.238.77 1	10 0	68.853.75 4	10 0	75.088.21 7	10 0	82.266.35 0	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	4.250.000	2	2.666.990	2	3.153.094	2	3.438.595	2	3.767.311	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Dokumen)												
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	15.650.000	1	33.123.744	1	39.161.096	1	42.706.994	1	46.789.612	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	4.500.000	1	18.826.630	1	22.258.096	1	24.273.488	1	26.593.936	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4	6.450.000	4	3.621.407	4	4.281.468	4	4.669.140	4	5.115.491	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				81.250.00 0		213.718.6 10		285.758.1 33		328.068.8 80		276.783.9 16	
Meningkatny a Profesionalita s ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalit as ASN Perangkat Daerah (Indeks)	-	71	81.250.00 0	71	213.718.6 10	71	285.758.1 33	71	328.068.8 80	71	276.783.9 16	
	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah (Indeks)	-	70		70		70		70		70		
	Nilai Hasil Survey Implementas	-	50		50		50		50		50		



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i ASN BerAKHLAK (Nilai)												
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	4	2.500.000	4	7.500.000	4	11.000.000	4	18.000.000	4	25.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	9	13.500.000	9	45.805.452	9	53.087.756	9	54.892.670	9	57.500.553	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	6	38.250.000	6	31.976.462	6	36.738.203	6	37.062.723	6	37.966.135	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Dokumen)												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	22.500.000	3	70.936.696	5	123.932,175	7	150.113.487	10	181.317.228	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	25	4.500.000	30	57.500.000	35	61.000.000	40	68.000.000	45	75.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				450.055.210		508.329.083		671.639.231		767.555.668		877.990.323	
Meningkatnya Kematangan SPBE	Nilai Kematangan Penerapan SPBE Pada	-	2,6	7.500.000	2,6	90.545.870	2,6	161.165.218	2,6	202.641.858	2,6	250.396.535	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah (Nilai)												
Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah (Nilai)	-	60	10.000.000	60	24.218.348	60	52.466.087	60	69.056.743	60	88.158.614	
Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) (Nilai)	-	2,5	252.282.000	2,5	176.944.791	2,5	209.195.914	2,5	228.137.865	2,5	249.946.930	
Meningkatnya Penerapan SP4N Lapor Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjutan Laporan Pengaduan Melalui SP4N Lapor (%)	-	100	180.273.210	100	216.620.074	100	248.812.012	100	267.719.202	100	289.488.244	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	1	10.509.625	1	10.637.396	1	12.576.238	1	13.714.972	1	15.026.068	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	72.004.385	1	112.879.955	1	126.163.535	1	133.965.339	1	142.948.049	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	16.909.200	1	17.114.815	1	20.234.274	1	22.066.416	1	24.175.876	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	4	80.850,000	4	75.987.908	4	89.837.965	4	97.972.475	4	107.338.251	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi	1	4	252.282.000	4	176.944.791	4	209.195.914	4	228.137.865	4	249.946.930	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKPD	dan Konsultasi SKPD (Laporan)												
Penatausahaa n Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis Pada SKPD (Dokumen)	-	4	10.000.000	4	24.218.348	4	52.466.087	4	69.056.743	4	88.158.614	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (Dokumen)	-	4	7.500.000	4	90.545.870	4	161.165.21 8	4	202.641.85 8	4	250.396.53 5	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				374.923.4 80		624.084.4 61		719.744.7 22		775.928.5 62		840.616.5 69	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE (Nilai)	-	70,00	374.923.480	70,00	624.084.461	70,00	719.744.722	70,00	775.928.562	70,00	840.616.569	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	41.200.000	2	436.327.522	3	478.699.131	4	503.585.115	5	532.237.921	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	-	1	62.876.680	1	45.211.504	1	53.452.051	1	58.291.946	1	63.864.422	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	5	270.846.800	5	142.545.435	5	187.593.540	5	214.051.501	5	244.514.228	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				701.187.343		612.791.895		724.483.384		790.082.794		865.611.541	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Nilai)	-	3,51	701.187.343	3,51	612.791.895	3,51	724.483.384	3,51	790.082.794	3,51	865.611.541	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	88,50		88,50		88,50		88,50		88,50		



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pada Aplikasi SKM Terintegrasi (Nilai)												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	656.277.34 3	12	567.335.79 2	12	670.742.15 2	12	731.475.48 3	12	801.401.60 6	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	44.910.000	4	45.456.103	4	53.741.232	4	58.607.311	4	64.209.935	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				622.600.2 14		578.454.9 49,90		561.294.5 34		782.145.6 93,33		1.047.852 .499,51	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara (%)	-	100	622.600.214	100	578.454.949,90	100	561.294.534	100	782.145.693,33	100	1.047.852.499,51	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	193.900.000	5	205.945.154	5	253.015.492	5	280.661.166	5	312.491.376	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4	4	58.700.000	4	59.413.789	4	70.242.938	4	76.603.187	4	83.926.145	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dipelihara (Unit)												
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	338.526.27 9	1	269.502.98 0,90	1	143.597.14 7	1	300.579.20 2,33	1	492.749.47 3,51	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	-	1	31.473.935	1	43.593.026	1	94.438.957	1	124.302.13 8	1	158.685.50 5	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				156.382.4 68,97		253.447.3 88,31		324.114.5 01,63		404.987.9 79,52		497.655.6 43,21	
Meningkatny a Kualitas Layanan Izin	Persentase Koperasi Simpan	13,1 6	14, 71	156.382.4 68,97	16, 18	253.447.3 88,31	17, 65	324.114.5 01,63	19, 12	404.987.9 79,52	20, 59	497.655.6 43,21	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Usaha Simpan Pinjam	Pinjam yang Diberikan Layanan Perizinan (%)												
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				66.732.46 9,39		102.153.5 43,51		150.611.3 70,12		180.843.7 29,08		225.954.8 71,39	
Meningkatny a Kualitas Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam	Persentase Kualitas Fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam (%)	7,89	14, 71	66.732.46 9,39	16, 18	102.153.5 43,51	17, 65	150.611.3 70,12	19, 12	180.843.7 29,08	20, 59	225.954.8 71,39	
Fasilitasi izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah	3	7	66.732.469 ,39	11	102.153.54 3,51	14	150.611.37 0,12	19	180.843.72 9,08	23	225.954.87 1	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)												
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K				89.649.999,58		151.293.844,80		173.503.132		224.144.250		271.700.772	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatny a Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (%)	5,26	66, 67	89.649.99 9,58	70, 00	151.293.8 44,80	75, 00	173.503.1 32	76, 92	224.144.2 50	81, 82	271.700.7 72	
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha	2	7	89.649.999 ,58	10	151.293.84 4,80	12	173.503.13 2	15	224.144.25 0	18	271.700.77 2	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Simpan Pinjam (Unit Usaha)												
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				1.206.106 .463,20		1.334.034 .572,64		1.427.171 .295		1.533.759 .640		1.655.892 .301	
Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	-	22,39	1.206.106 .463,20	23,13	1.334.034 .572,64	24,63	1.427.171 .295	26,12	1.533.759 .640	27,61	1.655.892 .301	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1				1.052.103 .550,00		1.100.000 .000,00		1.150.000 .000		1.204.179 .587		1.300.000 .000	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(satu) Daerah Provinsi													
Meningkatnya Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi (%)	13,46	18,66	1.052.103.550,00	19,40	1.100.000.000,00	20,15	1.150.000.000	21,64	1.204.179.587	22,39	1.300.000.000	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	7	20	1.052.103.550,00	27	1.100.000.000,00	34	1.150.000.000	40	1.204.179.587	47	1.300.000.000	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah				154.002.913,20		234.034.572,64		277.171.295		329.580.053		355.892.300,82	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatny a Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan Untuk Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (%)	5,26	36, 76	154.002.9 13,20	39, 71	234.034.5 72,64	41, 18	277.171.2 95	42, 65	329.580.0 53	44, 12	355.892.3 00,82	
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2	25	154.002.91 3,20	30	234.034.57 2,64	32	277.171.29 5	36	329.580.05 3	39	355.892.30 0,82	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				121.855.0 17,97		197.489.1 42,78		252.553.7 76		315.571.3 28		387.779.0 47,88	
Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat (%)	56,38	29,85	121.855.0 17,97	30,60	197.489.1 42,78	31,34	252.553.7 76	32,09	315.571.3 28	32,84	387.779.0 47,88	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah				121.855.0 17,97		197.489.1 42,78		252.553.7 76		315.571.3 28		387.779.0 47,88	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Provinsi													
Meningkatny a Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi (%)	36,8 4	32, 84	121.855.0 17,97	33, 58	197.489.1 42,78	34, 33	252.553.7 76	35, 07	315.571.3 28	35, 82	387.779.0 47,88	
Penilaian Kesehatan Koperasi yang Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	14	30	121.855.01 7,97	35	197.489.14 2,78	40	252.553.77 6	45	315.571.32 8	49	387.779.04 7,88	
Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi				2.931.888 .937		2.877.133 .701,08		3.121.699 .278,45		3.401.587 .163,53		3.722.292 .508,23	
Meningkatny a Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatny a Koperasi Berkualitas (%)	26,4 7	41, 18	368.333.3 44	17, 65	121.913.6 12,88	23, 53	191.678.0 14,91	26, 47	251.624.3 34,49	38, 24	320.368.4 11,81	
Meningkatny a Pertumbuhan	Pertumbuha n Volume Usaha	0,4	0,6 5	2.563.555 .592	0,7 9	2.755.220 .088,20	0,9 2	2.930.021 .263,54	1,0 6	3.149.962 .829,04	1,1 9	3.401.924 .096,42	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Volume Usaha Koperasi	Koperasi (%)												
Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Meningkatn ya Cakupan Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi	Persentase Cakupan Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi (%)	24,3 9	52	2.931.888 .936	31, 50	2.877.133 .701,08	34, 88	3.121.699 .278,45	39, 69	3.401.587 .163,53	42, 11	3.722.292 .508,23	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	45	75	245.555.56 2	77	282.403.65 3,04	79	314.185.68 4,28	81	354.175.06 0,1	83	399.986.19 9,35	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisas i Usaha	Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisa si Usaha (Unit Usaha)												
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya (Keluarga)	280	350	245.555.56 2	355	282.403.65 3,04	360	314.185.68 4,28	365	354.175.06 0,1	370	399.986.19 9,35	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang Dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	15	18	245.555.562	20	282.403.653,04	22	314.185.684,28	24	354.175.060,1	26	399.986.199,35	
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	3	5	206.555.562	6	282.403.653,04	7	314.185.684,28	9	354.175.060,1	11	399.986.199,35	
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	550	3260	1.252.000.000	3261	1.202.000.000	3262	1.202.000.000	3263	1.202.000.000	3264	1.202.000.000	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaann ya Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalann ya (Unit Usaha)	25	100	368.333.34 3	105	423.605.47 6,04	110	471.278.52 6,42	115	531.262.58 8,64	120	599.979.29 9,02	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diberdayakan (Unit Usaha)	25	100	368.333.34 4	40	121.913.61 2,88	45	191.678.01 4,91	50	251.624.33 4,49	75	320.368.41 1,81	
Program Pemberdayaa				2.263.161 .023,27		2.444.326 .200,55		2.655.368 .807,78		2.882.559 .691,52		3.143.264 .925,21	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)													
Meningkatny a Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransform asi dari Informal ke Formal (%)	0	0,1 2	1.201.000 .000,00	0,1 3	1.231.970 .318,43	0,1 4	1.192.313 .791,18	0,1 5	1.269.708 .613,48	0,1 6	1.340.577 .099,07	
	Persentase Pertumbuha n Wirausaha (%)	2,90	2,1 8		2,2 3		2,4 0		2,5 5		2,7 0		
Meningkatny a Akses UMKM Terhadap Sumber Daya Produktif	Pertumbuha n Pelaku Usaha Hasil Pendamping an yang Memiliki Kemampuan Mengakses Sumber Daya Produktif	0	0,1 5	1.062.161 .023,27	0,1 6	1.212.355 .882,12	0,1 7	1.463.055 .016,60	0,1 8	1.612.851 .078,04	0,1 9	1.802.687 .826,14	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Usaha (%)												
Pemberdayaa n Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				2.263.161 .023,27		2.444.326 .200,55		2.655.368 .807,78		2.882.559 .691,52		3.143.264 .925,21	
Meningkatny a Fasilitasi Perizinan Usaha Bagi Pelaku Usaha	Persentase Fasilitasi Perizinan Usaha Bagi Pelaku Usaha (%)	0	0,1 2	201.000.0 00,00	0,1 3	231.970.3 18,43	0,1 4	192.313.7 91,18	0,1 5	269.708.6 13,48	0,1 6	340.577.0 99,07	
Meningkatny a Cakupan Pemberdayaa n UMKM	Persentase Cakupan Pemberdayaa n UMKM (%)	0	0,1 5	1.062.161 .023,27	0,1 6	1.212.355 .882,12	0,1 7	1.463.055 .016,60	0,1 8	1.612.851 .078,04	0,1 9	1.802.687 .826,14	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Wirausaha	Persentase Wirausaha Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan (%)	0	0,16	1.000.000.000,00	0,20	1.000.000.000,00	0,24	1.000.000.000,00	0,26	1.000.000.000,00	0,28	1.000.000.000,00	
Menumbuhkan dan mengembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	30	270	151.326.935,00	320	149.821.456,18	350	266.985.760,09	400	333.982.469,60	460	410.862.281,31	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan												



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaa n	UKM dan Kewirausahaa n (Orang)												
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	120	58.932.691 ,00	100	58.346.399 ,19	160	103.974.81 1,47	200	130.065.97 9,65	240	160.006.01 9,26	
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil yang Terdata (Unit Usaha)	-	8.8 14	101.901.39 7,00	11. 186	130.149.49 9,05	13. 735	149.780.65 3,86	16. 796	129.094.01 5,31	20. 407	141.242.42 6,50	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaa n melalui Pendidikan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaa n (Orang)	-	300	1.000.000. 000,00	400	1.000.000. 000,00	500	1.000.000. 000,00	600	1.000.000. 000,00	700	1.000.000. 000,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan Pelatihan													
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)												
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)												
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)												
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Usaha Kecil yang												



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Usaha Kecil	Terfasilitasi (Unit Usaha)												
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	280	750.000.00 0,00	290	874.038.52 7,70	310	942.313.79 1,18	350	1.019.708. 613,48	370	1.090.577. 099,07	
Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	300	201.000.00 0,00	400	231.970.31 8,43	500	192.313.79 1,18	600	269.708.61 3,48	700	340.577.09 9,07	
Program Pengembanga n UMKM				2.168.727 .913,58		2.358.132 .599,64		2.510.246 .245,27		2.698.661 .827,99		2.914.173 .045,07	
Meningkatny a Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	1,25	6,8 5	1.000.000 .000,00	7,7 5	1.000.000 .000,00	8,4 5	1.000.000 .000,00	8,9 5	1.000.000 .000,00	9,2 3	1.000.000 .000,00	
Meningkatny a Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas (%)	-	0,0 19	1.084.021 .137,58	0,0 22	1.235.110 .106,15	0,0 26	1.356.451 .846,27	0,0 29	1.506.751 .799,95	0,0 33	2.678.666 .067,87	
Meningkatny a Jumlah Wirausaha	Persentase Wirausaha Baru (%)	-	0,1 9	84.706.77 6,00	0,2 0	123.022.4 93,49	0,2 1	153.794.3 99,00	0,2 2	191.910.0 28,04	2,2 4	235.506.9 77,20	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembang an Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				2.168.727 .913,58		2.358.132 .599,64		2.510.246 .245,27		2.698.661 .827,99		2.914.173 .045,07	
Meningkatny a Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan	Persentase UMKM yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan (%)	0,11	0,1 6	1.000.000 .000,00	0,2 0	1.000.000 .000,00	0,2 4	1.000.000 .000,00	0,2 6	1.000.000 .000,00	0,2 8	1.000.000 .000,00	
Meningkatny a Cakupan Pengembang an UMKM	Persentase Cakupan Pengembang an UMKM (%)	-	0,1 1	1.084.021 .137,58	0,1 3	764.966.1 11,02	0,1 4	459.649.3 46,44	0,1 5	1.506.751 .799,95	0,1 6	705.642.0 03,77	
Meningkatny a Dukungan Fasilitasi Pengembang an Usaha Kepada Calon Wirausaha	Persentase Calon Wirausaha Yang Difasilitasi Dalam Pengembang	-	20, 00	84.706.77 6,00	25, 00	123.022.4 93,49	30, 00	153.794.3 99,00	35, 00	191.910.0 28,04	40, 00	235.506.9 77,20	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	an Usaha (%)												
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	-	330	921.364.81 0,58	290	865.263.25 8,02	370	1.023.427. 438,44	380	1.116.321. 506,69	390	1.223.276. 319,77	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Unit Usaha)	25	30	54.920.665 ,00	60	107.632.64 6,23	70	135.155.51 6,00	90	177.433.79 3,70	130	227.382.75 2,74	
Pengembang an Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	-	300	1.000.000. 000,00	400	1.000.000. 000,00	500	1.000.000. 000,00	600	1.000.000. 000,00	700	1.000.000. 000,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Pengembanga n Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Unit Usaha)												
Penumbuhan dan Pengembanga n Kewirausahaa n	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	-	200	84.706.776 ,00	250	123.022.49 3,49	300	153.794.39 9,00	350	191.910.02 8,04	400	235.506.97 7,20	
Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	200	107.735.66 2,00	250	262.214.20 1,90	300	197.868.89 1,83	350	212.996.49 9,56	400	228.006.99 5,36	
Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan		90,0 1	91, 15	306.287.6 42,00	92, 00	367.289.7 76,14	94, 50	353.573.9 32,88	95, 70	365.461.7 90,79	96, 90	378.922.5 49,24	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Provinsi													
Meningkatny a Kualitas Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)												
Administrasi Umum Perangkat Daerah				175.286.5 62,00		236.288.6 16,14		222.572.7 72,88		234.460.6 30,79		247.921.3 89,24	
Meningkatny a Layanan Administrasi Umum UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	-	10 0	175.286.5 62,00	10 0	236.288.6 16,14	10 0	222.572.7 72,88	10 0	234.460.6 30,79	10 0	247.921.3 89,24	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan	1	1	4.002.124, 00	1	4.002.124, 00	1	4.002.124, 00	1	4.002.124, 00	1	4.002.124, 00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.855.100,00	1	17.855.100,00	1	17.855.100,00	1	17.855.100,00	1	17.855.100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.844.300,00	1	10.844.300,00	1	10.844.300,00	1	10.844.300,00	1	10.844.300,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.460.958,00	1	9.269.468,67	1	8.637.997,45	1	9.185.309,05	1	9.805.036,28	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	4	2.250.000,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Laporan)												
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	133.874.00 0,00	4	192.067.62 3,47	4	178.983.25 1,43	4	190.323.79 7,74	4	203.164.82 8,96	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.971.16 0,00		26.971.16 0,00		26.971.16 0,00		26.971.16 0,00		26.971.16 0,00	
Meningkatny a Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah (%)	-	10 0	26.971.16 0,00	10 0	26.971.16 0,00	10 0	26.971.16 0,00	10 0	26.971.16 0,00	10 0	26.971.16 0,00	
Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	1	4	26.971.160 ,00	4	26.971.160 ,00	4	26.971.160 ,00	4	26.971.160 ,00	4	26.971.160 ,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.200.00 0,00		59.200.00 0,00		59.200.00 0,00		59.200.00 0,00		59.200.00 0,00	
Meningkatny a Penyediaan Jasa Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah (%)	-	10 0	59.200.00 0,00	10 0	59.200.00 0,00	10 0	59.200.00 0,00	10 0	59.200.00 0,00	10 0	59.200.00 0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	59.200.000 ,00	12	59.200.000 ,00	12	59.200.000 ,00	12	59.200.000 ,00	12	59.200.000 ,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.830.00 0,00		44.830.00 0,00		44.830.00 0,00		44.830.00 0,00		44.830.00 0,00	
Meningkatny a Ketersediaan Aset Penunjang UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (%)	-	10 0	44.830.00 0,00	10 0	44.830.00 0,00	10 0	44.830.00 0,00	10 0	44.830.00 0,00	10 0	44.830.00 0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	1	1	15.350.000 ,00	1	15.350.000 ,00	1	15.350.000 ,00	1	15.350.000 ,00	1	15.350.000 ,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Jabatan	Perizinannya (Unit)												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	4.860.000,00	4	4.860.000,00	4	4.860.000,00	4	4.860.000,00	4	4.860.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	14.620.000,00	4	14.620.000,00	4	14.620.000,00	4	14.620.000,00	4	14.620.000,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(Unit)												
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				212.382.3 60,19		259.977.9 52,44		363.190.6 19,27		453.725.5 01,81		557.624.3 07,89	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	0,80	0,9 7	212.382.3 60,19	1,1 2	259.977.9 52,44	1,3 8	363.190.6 19,27	1,5 1	453.725.5 01,81	1,8 3	557.624.3 07,89	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				212.382.3 60,19		259.977.9 52,44		363.190.6 19,27		453.725.5 01,81		557.624.3 07,89	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	10 0	212.382.3 60,19	10 0	259.977.9 52,44	10 0	363.190.6 19,27	10 0	453.725.5 01,81	10 0	557.624.3 07,89	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koperasi yang Berkualitas (%)												
Meningkatnya Pemanfaatan Modul Dalam Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Penyediaan Modul Pelatihan Perkoperasian (%)	-	100		100		100		100		100		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	-	80	212.382.360,19	60	259.977.952,44	90	363.190.619,27	120	453.725.501,81	150	557.624.307,89	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				212.382.360,19		320.980.086,58		410.476.910,14		512.899.650,6		630.259.215,13	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K et .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatny a Kualitas SDM UMKM yang Terlatih	Persentase Kualitas SDM UMKM yang Terlatih (%)	0,73	0,8 7	212.382.3 60,19	0,9 3	320.980.0 86,58	0,9 8	410.476.9 10,14	1,1 0	512.899.6 50,6	1,5 0	630.259.2 15,13	
Pemberdayaa n Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		-		212.382.3 60,19		320.980.0 86,58		410.476.9 10,14		512.899.6 50,6		630.259.2 15,13	
Meningkatny a Kualitas Pendidikan dan Pelatihan UMKM	Persentase Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan UMKM yang	-	10 0	212.382.3 60,19	10 0	320.980.0 86,58	10 0	410.476.9 10,14	10 0	512.899.6 50,6	10 0	630.259.2 15,13	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Base line 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Berkualitas (%)												
Meningkatny a Pemanfaatan Modul Dalam Pendidikan dan Latihan UMKM	Persentase Penyediaan Modul Pelatihan UMKM dan Kewirausaha an (%)	-	10 0		10 0		10 0		10 0		10 0		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausaha an	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausaha an (Orang)	-	60	212.382.36 0,19	60	320.980.08 6,58	90	410.476.91 0,14	120	512.899.65 0,6	150	630.259.21 5,13	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029



Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) 2. Meningkatnya Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Usulan Tambahan)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Provinsi	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Meningkatkan Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri (Inmendagri Nomor 2	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
		Tahun 2025) 2. Meningkatnya Akses UMKM Terhadap Sumber Daya Produktif (Usulan Tambahan)	Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
			Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	
			Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
			Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
			Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta	



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
4	Program Pengembangan UMKM	1. Meningkatnya Daya Saing UMKM (Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025) 2. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (Usulan Tambahan) 3. Meningkatnya Jumlah Wirausaha (Usulan Tambahan)	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
			Pengembangan Usaha Kecil	
			Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* sesuai dengan sasaran rencana.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**

Tabel 4.4.
**Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	%	2,70	2,78	2,87	2,96	3,06	3,12	
2	Rasio Kewirausahaan	%	3,21	3,28	3,34	3,42	3,50	3,62	
3	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi Terhadap Total Volume Usaha Koperasi	%	66,42	67,08	68,50	69,72	70,11	71,61	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029



Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Koperasi Aktif	%	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	4,72	4,92	5,12	5,32	5,57	5,82	
3	Persentase Koperasi Berkualitas	%	9,63	12,04	14,45	16,86	19,27	21,68	
4	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	%	3,33	3,53	3,73	3,93	4,13	4,33	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029; dan

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan disusun setiap tahunnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja tahunan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Rencana Strategis.

Palu, 12 September 2025